

MODERASI BERAGAMA DALAM PENDIDIKAN ISLAM:

**MEMBANGUN GENERASI
TOLERAN, INKLUSIF, DAN
BERKEADABAN**

Buku ini mengupas konsep, urgensi, dan implementasi moderasi beragama dalam pendidikan Islam sebagai upaya membangun generasi yang toleran, inklusif, dan berkeadaban. Dengan pendekatan yang sistematis, buku ini menguraikan hakikat moderasi beragama, landasan normatif, sejarah, kebijakan nasional, hingga penerapannya dalam praktik pendidikan Islam. Disusun secara komprehensif, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi pendidik, mahasiswa, praktisi pendidikan, maupun pembaca umum yang peduli terhadap kehidupan beragama yang harmonis dan berkeadaban.

MODERASI BERAGAMA

DALAM PENDIDIKAN ISLAM:

**MEMBANGUN GENERASI
TOLERAN, INKLUSIF, DAN
BERKEADABAN**

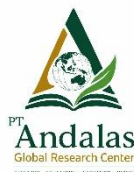


Editor
Fitri Arianti Saputri, S.H.

Salman, M.A
Yulda Dina Septiana, M.A
Herina Yanti, M.Pd.I
Riri Susanti, M. Pd.

MODERASI BERAGAMA DALAM PENDIDIKAN ISLAM: MEMBANGUN GENERASI TOLERAN, INKLUSIF, DAN BERKEADABAN

Salman, M.A
Yulda Dina Septiana, M.A
Herina Yanti, M.Pd.I
Riri Susanti, M. Pd.



Penerbit PT Andalas Global Research Center



Judul : **Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam: Membangun Generasi Toleran, Inklusif, Dan Berkeadaban**

Penulis : Salman, Yulda D.S., Herina Y., Riri S.

Editor : Fitri Arianti Saputri, S.H.

Ilustator : Rahmat Purnomo, S.Kom.

Penerbit : **PT Andalas Global Research Center**
Jl. Mulia 2 Nomor 52A, Sariharjo, Ngaglik,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,
55581.

Telp : +62 811 7488 066

Email : globalpublisherofficial@gmail.com

Website : www.andalaspress.com

ISBN : xxxx

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)
ix + 136 halaman; 14,8 cm x 21 cm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

***Diterbitkan oleh PT Andalas Global Research Center,
Yogyakarta, 2026***

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, ilmu, dan amal. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama dalam bersikap moderat, toleran, dan berkeadaban. Dialah sosok yang telah mencontohkan bagaimana beragama dengan seimbang—tegas dalam kebenaran, tetapi lembut dalam menyampaikan, serta menghargai kemanusiaan tanpa mengorbankan prinsip.

Buku ini lahir dari sebuah kegelisahan intelektual yang sekaligus menjadi harapan. Kegelisahan itu muncul ketika kita menyaksikan bagaimana agama yang seharusnya menjadi sumber kedamaian kadang justru dijadikan alat untuk membenarkan kekerasan, kebencian, dan permusuhan. Kita menyaksikan bagaimana generasi muda, yang seharusnya menjadi penerus peradaban, justru terpapar pada paham-paham ekstrem yang menyesatkan. Kita juga menyaksikan bagaimana media sosial, yang seharusnya menjadi sarana untuk saling mengenal, kadang justru menjadi ruang yang memperkuat prasangka dan perpecahan.

Namun, di tengah kegelisahan itu, ada harapan yang tidak pernah padam. Harapan itu tumbuh dari kesadaran bahwa Islam memiliki tradisi panjang dalam mengajarkan moderasi wasathiyyah yang telah dipraktikkan oleh Nabi, para sahabat, dan para ulama sepanjang sejarah. Harapan itu juga tumbuh dari keyakinan bahwa pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membangun generasi yang tidak hanya

cerdas secara intelektual dan spiritual, tetapi juga toleran, inklusif, dan berkeadaban.

Buku ini adalah ikhtiar untuk menjawab tantangan tersebut. Ia disusun secara sistematis, dimulai dari penggalian hakikat dan urgensi moderasi beragama, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai landasan normatif, sejarah, kebijakan nasional, hingga implementasinya dalam praktik pendidikan Islam. Setiap bab dirancang untuk tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenung, menimbang, dan pada akhirnya bertindak.

Kami menyadari bahwa buku ini bukanlah karya yang sempurna. Ia adalah bagian dari proses panjang pembelajaran yang tidak pernah selesai. Karena itu, kami membuka diri terhadap kritik, saran, dan masukan yang membangun dari para pembaca. Kami percaya bahwa setiap kritik adalah hadiah, dan setiap saran adalah jalan untuk menjadi lebih baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih kepada para guru, dosen, dan praktisi pendidikan yang telah berbagi pengalaman dan pemikiran. Terima kasih kepada keluarga, sahabat, dan kolega yang telah memberikan dukungan moral dan intelektual. Terima kasih juga kepada para penulis dan peneliti yang karyanya menjadi rujukan dalam buku ini.

Akhirnya, kami berharap buku ini dapat menjadi sumbangan kecil bagi upaya besar membangun generasi muslim yang moderat dan berkeadaban. Semoga Allah SWT meridai setiap usaha, memberkahi setiap langkah,

dan menjadikan buku ini sebagai amal jariyah yang bermanfaat bagi banyak orang. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I HAKIKAT DAN URGENSI MODERASI BERAGAMA.....	1
1.1 Pengertian dan Konsep Dasar Moderasi Beragama (Wasathiyah)	1
1.2 Landasan Al-Qur'an dan Hadis tentang Moderasi.....	4
1.3 Sejarah Perkembangan Wacana Moderasi Beragama di Indonesia.....	6
1.4 Urgensi Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.....	9
1.5 Moderasi Beragama sebagai Kebijakan Nasional (Kemenag RI)	12
BAB II MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM	17
2.1 Konsep Pendidikan Islam yang Rahmatan lil 'Alamin.....	17
2.2 Tujuan Pendidikan Islam dalam Membangun Sikap ModeratAl-Qur'an dan Hadis tentang Moderasi.....	19
2.3 Nilai-Nilai Moderasi dalam Kurikulum Pendidikan Islam	21
2.4 Peran Lembaga Pendidikan Islam sebagai Agen Moderasi	24
2.5 Integrasi Moderasi Beragama dalam Visi-Misi Pendidikan Islam	25

BAB III TOLERANSI, TASAMUH, TAWASSUTH, DAN TAWAZUN	28
3.1 Konsep Tasamuh (Toleransi) dalam Islam....	28
3.2 Tawassuth (Sikap Tengah-Tengah) sebagai Prinsip Beragama	30
3.3 Tawazun (Keseimbangan) dalam Kehidupan Sosial dan Beragama	32
3.4 I'tidal (Tegak Lurus) dan Musawah (Kesetaraan) sebagai Pelengkap Moderasi ..	34
3.5 Implementasi Empat Pilar Moderasi dalam Kehidupan Sehari-hari	36
BAB IV PENDIDIKAN ISLAM DAN PEMBENTUKAN KARAKTER MODERAT	39
4.1 Konsep Pendidikan Karakter dalam Islam....	39
4.2 Strategi Pembentukan Karakter Moderat melalui Pendidikan Formal	41
4.3 Peran Guru PAI sebagai Teladan Moderasi Beragama	43
4.4 Metode Pembiasaan dan Keteladanan dalam Membentuk Sikap Moderat.....	45
4.5 Evaluasi Pembentukan Karakter Moderat Peserta Didik	47
BAB V PENGUATAN SIKAP INKLUSIF DALAM PEMBELAJARAN PAI	50
5.1 Konsep Inklusivitas dalam Pendidikan Agama Islam.....	50
5.2 Desain Pembelajaran PAI Berbasis Nilai Inklusif	52
5.3 Metode dan Pendekatan Pembelajaran yang Mendukung Inklusivitas	54
5.4 Peran Media dan Bahan Ajar dalam Menanamkan Sikap Inklusif.....	56

5.5	Studi Kasus Implementasi Pembelajaran Inklusif di Sekolah/Madrasah	57
BAB VI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM		61
6.1	Konsep Multikulturalisme dan Keberagaman dalam Islam	61
6.2	Prinsip Ta'aruf dan Ukhuwah sebagai Basis Pendidikan Multikultural	63
6.3	Model Pendidikan Multikultural di Sekolah/Madrasah	65
6.4	Tantangan Implementasi Pendidikan Multikultural di Indonesia	67
6.5	Peran Kearifan Lokal dalam Mendukung Pendidikan Multikultural	69
BAB VII DIALOG ANTARAGAMA DAN PENGUATAN KERUKUNAN		73
7.1	Konsep dan Landasan Dialog Antaragama dalam Islam	73
7.2	Model-Model Dialog Antaragama di Indonesia	76
7.3	Peran Pendidikan dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama	78
7.4	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendidikan.....	80
7.5	Tantangan dan Strategi Penguatan Dialog Antaragama.....	82
BAB VIII LITERASI DIGITAL DAN MODERASI BERAGAMA.....		86
8.1	Literasi Digital dalam Konteks Keberagamaan	86
8.2	Dampak Media Sosial terhadap Pemahaman Keagamaan Generasi Muda	88

8.3	Strategi Penguatan Literasi Digital Berbasis Moderasi Beragama	91
8.4	Peran Konten Dakwah Digital yang Moderat	94
8.5	Pendidikan Media dan Kecakapan Berpikir Kritis Siswa.....	97
BAB IX TANTANGAN EKSTREMISME DAN RADIKALISME DI ERA DIGITAL		101
9.1	Konsep dan Ciri-Ciri Ekstremisme serta Radikalisme Beragama.....	101
9.2	Faktor Penyebab Radikalisasi di Kalangan Generasi Muda	104
9.3	Pola Penyebaran Paham Radikal melalui Media Digital.....	107
9.4	Peran Pendidikan dalam Deradikalisasi dan Pencegahan Ekstremisme	110
9.5	Kolaborasi Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat dalam Menangkal Radikalisme	113
BAB X STRATEGI MEMBANGUN GENERASI MUSLIM YANG MODERAT DAN BERKEADABAN		117
10.1	Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Moderasi.....	117
10.2	Penguatan Kompetensi Guru dalam Menanamkan Nilai Moderasi.....	120
10.3	Kolaborasi Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal.....	122
10.4	Model Sekolah/Madrasah Ramah Moderasi Beragama	125
10.5	Proyeksi dan Rekomendasi Kebijakan untuk Generasi Moderat Masa Depan	127
DAFTAR PUSTAKA		131

BAB I

HAKIKAT DAN URGENSI MODERASI BERAGAMA

1.1 Pengertian dan Konsep Dasar Moderasi Beragama (Wasathiyyah)

1.1.1 Etimologi dan Definisi *Wasathiyyah*

Secara bahasa, kata wasathiyyah berasal dari akar kata Arab wasatha yang berarti tengah, pertengahan, atau seimbang. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini umumnya diterjemahkan sebagai "moderasi." Namun, cakupan makna wasathiyyah sebenarnya lebih luas daripada sekadar moderasi dalam pengertian sehari-hari. Ia mencakup dimensi realistis, yakni posisi Islam yang berada di antara realitas dan idealitas, antara cita-cita luhur dan kondisi objektif yang dihadapi umat manusia.

M. Quraish Shihab memberikan definisi yang lebih komprehensif: wasathiyyah adalah keseimbangan dalam segala persoalan hidup duniawi dan ukhrawi, yang selalu disertai upaya menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi berdasarkan petunjuk agama dan kondisi objektif. Penekanan pada "upaya menyesuaikan diri" ini penting, karena moderasi bukanlah posisi statis yang sudah jadi resep baku, melainkan proses terus-menerus untuk menemukan dan menerapkannya.

Dalam khazanah fikih, terdapat dua makna wasathiyyah. Pertama, moderasi bagi umat (wasathiyyat al-ummah), yang mengandung arti keadilan, kebaikan, dan integritas. Kedua, moderasi bagi individu (wasathiyyat al-fardi), yang berarti bersikap sedang dalam setiap urusan dengan cara memilih yang paling utama, terbaik, dan lebih adil.

1.1.2 Moderasi Beragama dalam Perspektif Kementerian Agama

Kementerian Agama Republik Indonesia merumuskan moderasi beragama sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Definisi ini menekankan keseimbangan sebagai inti, bukan sekadar posisi tengah yang pasif.

Dalam konstruksi resmi Kementerian Agama, "moderat" ditempatkan sebagai cara pandang serta praktik beragama yang mampu melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum. Ini berarti moderasi beragama bukanlah sekadar sikap beragama yang tidak ekstrem, tetapi juga cara beragama yang menghargai kemanusiaan, mengakui keragaman, dan membangun persatuan.

1.1.3 *Wasathiyyah* sebagai Jalan Tengah antara Dua Kutub Ekstrem

Salah satu fungsi utama wasathiyyah adalah sebagai solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama. Di satu sisi terdapat kutub ultra-

konservatif (ekstrem kanan) yang cenderung fanatik, tekstualis, dan menolak segala bentuk pembaruan. Di sisi lain terdapat kutub liberal (ekstrem kiri) yang cenderung mengabaikan teks-teks keagamaan dan terlalu bebas dalam menafsirkan ajaran agama.

Pilihan pada moderasi beragama berarti menolak kedua ekstremisme tersebut. Yang disebut moderat adalah mereka yang tidak berat sebelah, menimbang antara keduanya dengan rujukan dalil dan kesepakatan ulama. Dalam konteks ini, moderasi bukanlah sikap menghindar dari tanggung jawab atau berlindung di balik "jalan tengah" untuk tidak berpihak. Sebaliknya, moderasi menuntut keberpihakan pada kebenaran dengan penuh hikmah.

1.1.4 Dimensi-Dimensi Wasathiyyah

Realiasi wasathiyyah dalam ajaran Islam secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga dimensi utama: akidah, akhlak, dan syariat.

Dalam bidang akidah, wasathiyyah tampak pada posisi Islam yang berada di antara ateisme (tidak percaya Tuhan) dan politeisme (percaya banyak Tuhan). Islam menegaskan tauhid sebagai jalan tengah yang tidak ekstrem dalam kedua arah tersebut.

Dalam bidang akhlak, wasathiyyah tercermin pada keseimbangan antara sikap khauf (rasa takut yang berlebihan) dan raja' (harapan yang berlebihan). Seorang muslim yang moderat tidak larut dalam keputusan ketika menghadapi

kesulitan, namun juga tidak terlalu optimis hingga melupakan usaha dan doa.

Dalam bidang syariat, wasathiyyah membedakan antara syariat yang bersifat tetap (tsabit) dan syariat yang dapat berubah (mutaghayyirah) sesuai tuntutan zaman dan tempat. Akidah, akhlak, dan syariat yang bersifat tetap tidak dapat diubah, sedangkan syariat yang dapat berubah mampu beradaptasi dengan konteks ruang dan waktu.

Dengan pemahaman multidimensi ini, wasathiyyah bukanlah konsep tunggal yang sempit, melainkan sebuah kerangka komprehensif yang memandu umat Islam dalam menjalani kehidupan beragama secara seimbang di segala aspek.

1.2 Landasan Al-Qur'an dan Hadis tentang Moderasi

1.2.1 Wasathiyyah dalam Al-Quran

Moderasi beragama memiliki pijakan yang kokoh dalam sumber-sumber utama ajaran Islam. Landasan paling fundamental terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 143:

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kalian, umat tengahan agar kalian menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kalian."

Ayat ini menegaskan posisi umat Islam sebagai *ummatan wasathan*, yakni umat pertengahan. Kata *wasath* di sini oleh banyak mufasir diartikan sebagai sikap pertengahan, moderat, jalan tengah, seimbang antara dua kutub ekstrem. *Ummatan wasathan* berarti umat tengahan, bangsa yang berkeadilan, seimbang dalam ucapan dan perbuatan, tegak lurus, tidak condong ke barat maupun miring ke timur.

Dalam Tafsir al-Mawardi, setidaknya ada tiga penafsiran atas *ummatan wasathan*: pertama, umat pilihan; kedua, dari *al-tawassuth* (bersikap sedang) dalam semua urusan; ketiga, bersikap adil, karena adil berada di tengah antara lebih dan kurang.

Landasan Qur'ani lainnya adalah QS. Al-Hujurat [49]: 13 yang menegaskan prinsip keragaman sebagai desain Ilahi, serta QS. Yunus [10]: 99 yang menyatakan bahwa perbedaan keimanan adalah kehendak Allah dan tidak ada paksaan dalam beragama. QS. Al-Baqarah [2]: 256 secara tegas menyatakan *lā ikrāha fī al-dīn*—tidak ada paksaan dalam agama. Ayat-ayat ini menjadi fondasi normatif bagi sikap toleransi dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain.

1.2.2 Wasathiyyah dalam Hadis

Nabi Muhammad SAW secara konsisten meneladankan moderasi melalui kelembutan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap keragaman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda:

"Wahai manusia, hindarilah sikap berlebihan (melampaui batas), sebab umat-umat terdahulu binasa karena sikap melampaui batas dalam beragama." (HR. Nasai dan Ibnu Majah)

Hadis ini secara eksplisit memperingatkan bahaya *ghuluw* (berlebihan) dalam beragama, yang menjadi salah satu akar ekstremisme. Rasulullah juga mengajarkan keseimbangan dalam beribadah melalui sabdanya:

"Berjalanlah pertengahan, berjalanlah pertengahan agar kalian mencapai tujuan." (HR. Bukhari)

Dalam hadis lain, Nabi menegaskan bahwa agama itu mudah (*al-dīn yusr*), dan sikap berlebihan dalam beragama justru dapat menjauhkan seseorang dari tujuan agama itu sendiri. Teladan Nabi yang penuh kelembutan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap keragaman menjadi model bagi keseimbangan pemikiran dan praktik keagamaan.

1.2.3 Sintesis Normatif

Dengan demikian, moderasi beragama bukanlah konsep yang diciptakan belakangan, melainkan prinsip normatif yang tertanam kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Moderasi dipahami sebagai jalan tengah yang seimbang antara *ifrāth* (berlebihan) dan *tafrīth* (meremehkan). Prinsip ini berlaku dalam semua aspek ajaran Islam—teologi, ibadah, etika, dan hukum—sehingga membentuk kerangka Islam yang inklusif dan berorientasi perdamaian.

1.3 Sejarah Perkembangan Wacana Moderasi Beragama di Indonesia

1.3.1 Akar Historis: Moderasi dalam Tradisi Nusantara

Wacana moderasi beragama di Indonesia tidak lahir di ruang hampa. Nilai-nilai moderasi telah lama dipraktikkan oleh masyarakat Nusantara jauh sebelum istilah "moderasi beragama" dipopulerkan. Konsep dan nilai moderasi beragama tidak hanya dikenal di beberapa dekade terakhir, melainkan

telah dipraktikkan dan diamalkan oleh para nabi dan rasul dalam menyampaikan ajaran ketuhanan dan kemanusiaan.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, organisasi-organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sejak awal telah mengusung semangat moderasi. Muhammadiyah, misalnya, secara konsisten menggunakan istilah moderasi dan mengembangkan pemahaman *wasathiyyah* sebagai gerakan ilmu yang mengajak kepada rasionalitas dan objektivitas.

1.3.2 Krisis Radikalisme dan Respons Negara

Perkembangan wacana moderasi beragama secara lebih sistematis tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya ancaman radikalisme dan ekstremisme pada awal era Reformasi. Sejak akhir periode Orde Baru (Mei 1998), Indonesia mengalami transisi menuju demokrasi yang membuka ruang bagi lebih banyak kelompok untuk memperjuangkan aspirasinya. Indonesia menyaksikan pertumbuhan yang stabil dari varietas Islamisme konservatif yang baru dan tegas, yang diekspresikan dalam proliferasi terorisme, politik syariat, perlawanan terhadap liberalisme Islam, gerakan 212, hingga tumbuh suburnya ujaran kebencian atas nama agama.

Pemerintah Indonesia merespons dengan berbagai pendekatan keamanan: menerbitkan hukum anti-terorisme, mendirikan Detasemen Khusus (Densus) 88, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta memberikan kewenangan kepada Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membubarkan ormas keagamaan radikal.

Namun, pemerintah menyadari bahwa pendekatan yang ada masih belum cukup optimal. Medan pertempuran bukan hanya bersifat militeristik dan keamanan, melainkan juga menyangkut budaya dan ideologi. Dari kesadaran tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agama mengadvokasi gagasan moderasi beragama sebagai strategi jangka panjang.

1.3.3 Formalisasi Gagasan (2019 dan Sesudahnya)

Tahun 2019 menandai titik balik penting dalam sejarah moderasi beragama di Indonesia. Pada tahun tersebut, Kementerian Agama secara resmi memformulasikan konsep moderasi beragama dan menerbitkan buku berjudul *Moderasi Beragama*. Buku ini menjawab tiga hal utama: kajian konseptual moderasi beragama, pengalaman empirik moderasi beragama, serta strategi penguatan dan implementasi moderasi beragama.

Penelitian terkait moderasi beragama mulai marak dilakukan sejak tahun 2019. Pada tahun-tahun sebelumnya hampir tidak ada penelitian dengan tema tersebut. Secara umum, penelitian tahun 2019 masih didominasi oleh tataran konsep. Pada tahun 2020, penelitian tentang moderasi beragama semakin berkembang dengan tema yang lebih tajam, mulai muncul moderasi beragama sebagai solusi deradikalisasi, dan pembahasan mulai masuk ke lembaga pendidikan. Perkembangan

berlanjut pada tahun 2021 dengan terbitnya buku-buku hasil penelitian yang lebih mendalam.

1.3.4 Institusionalisasi dan Pelembagaan

Sejak 2019, moderasi beragama secara bertahap terinstitusionalisasi dalam kebijakan negara. Kementerian Agama menjadi sektor utama (*leading sector*) dalam merumuskan dan mengimplementasikan program moderasi beragama. Pada tahun 2020, moderasi beragama ditetapkan sebagai salah satu arah kebijakan negara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

Institusionalisasi ini juga tercermin dalam pembentukan lembaga-lembaga khusus, seperti Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM), yang aktif menyelenggarakan pelatihan, kampanye, dan koordinasi lintas sektor. Pada tahun 2026, pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga melalui Rapat Koordinasi Sekretariat Bersama (Sekber) Moderasi Beragama yang melibatkan kementerian koordinator, kementerian teknis, aparat penegak hukum, hingga TNI dan Polri.

1.4 Urgensi Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

1.4.1 Indonesia sebagai Negara Majemuk yang Religius

Indonesia adalah negara yang bermasyarakat religius dan majemuk. Meskipun bukan negara agama, menjaga keseimbangan antara hak beragama

dan komitmen kebangsaan menjadi tantangan bagi setiap warga negara. Dengan populasi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, terdiri atas ribuan suku, ratusan bahasa daerah, dan enam agama resmi yang diakui, Indonesia merupakan laboratorium keragaman yang memerlukan pengelolaan cermat.

Moderasi beragama merupakan perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa. Di Indonesia, beragama pada hakikatnya adalah ber-Indonesia, dan ber-Indonesia itu pada hakikatnya adalah beragama.

1.4.2 Tiga Tantangan Besar

Dalam konteks ke-Indonesia-an, setidaknya terdapat tiga tantangan besar yang menjadikan moderasi beragama sebagai kebutuhan mendesak.

Pertama, berkembangnya sikap dan praktik beragama yang berlebihan (ekstrem), yang mengabaikan martabat kemanusiaan. Ekstremisme dalam beragama tidak hanya merusak citra agama itu sendiri, tetapi juga mengancam keutuhan bangsa. Bangsa ini akan runtuh dan bubar jika umat beragama saling bermusuhan satu sama lain, lebih-lebih jika masing-masing agama menyerukan umatnya untuk berjihad melawan umat beragama lain yang berbeda iman.

Kedua, berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan tafsir agama yang dapat memicu konflik, ditambah dengan pengaruh kepentingan ekonomi dan politik. Dalam ruang publik yang demokratis, berbagai tafsir keagamaan bersaing untuk mendapatkan pengaruh. Tanpa

moderasi, persaingan ini dapat berubah menjadi konflik terbuka yang merugikan masyarakat luas.

Ketiga, semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ada kecenderungan pada sebagian kelompok untuk menempatkan identitas keagamaan di atas identitas kebangsaan, atau bahkan menganggap keduanya bertentangan. Moderasi beragama menawarkan kerangka yang memungkinkan keduanya berjalan seiring.

1.4.3 Moderasi sebagai Strategi Kebangsaan

Penerapan moderasi beragama di Indonesia bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah strategi kebangsaan yang krusial untuk merawat persatuan di tengah kompleksitas populasi yang multikultural. Konsep ini merupakan solusi perdamaian yang dirancang secara matang untuk mengelola perbedaan identitas, dengan tetap menghormati dan tanpa mencampuri urusan teologi masing-masing agama.

Moderasi beragama menjadi instrumen yang efektif dalam merawat kerukunan. Kerukunan umat beragama bukan sekadar hidup berdampingan secara damai, tetapi juga melibatkan kerja sama, saling membantu, dan saling menghormati antar pemeluk agama. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip moderasi, masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan secara rukun dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

1.4.4 Relevansi bagi Generasi Muda

Urgensi moderasi beragama menjadi semakin tinggi ketika dikaitkan dengan generasi muda. Sebagai penerus bangsa, generasi muda menghadapi tantangan yang tidak ringan: paparan radikalisme melalui media sosial, polarisasi identitas dalam politik, serta tekanan globalisasi yang dapat mengikis nilai-nilai lokal. Pendidikan Islam yang menanamkan nilai-nilai moderasi sejak dini menjadi investasi jangka panjang bagi keberlangsungan Indonesia sebagai bangsa yang toleran, inklusif, dan berkeadaban.

1.5 Moderasi Beragama sebagai Kebijakan Nasional (Kemenag RI)

1.5.1 Kementerian Agama sebagai Leading Sector

Kementerian Agama Republik Indonesia memainkan peran sentral sebagai konseptor dan penggerak utama dalam menginstitusikan nilai-nilai moderasi di tanah air. Terdapat empat langkah strategis yang telah dijalankan oleh kementerian dalam merumuskan kerangka kerja nasional.

Pertama, formalisasi gagasan kebangsaan: Kementerian Agama secara resmi memformulasikan konsep moderasi beragama pada tahun 2019 sebagai respons progresif terhadap tantangan kebangsaan serta dinamika kemajemukan yang kian kompleks.

Kedua, penyusunan kerangka kerja yang sistematis: kendati nilai-nilai moderasi telah lama hidup dan dipraktikkan dalam keseharian masyarakat, Kementerian Agama mengambil peran penting dalam menyusun penjabaran yang utuh,

terstruktur, dan aplikatif melalui kebijakan yang digulirkan oleh Menteri Agama.

Ketiga, penetapan batasan non-teologis: dalam merumuskan konsep ini, pemerintah secara sadar menetapkan bahwa moderasi beragama bergerak di ranah sosial-kemasyarakatan, bukan pada ranah teologi. Hal ini menjamin keyakinan dasar setiap agama tetap terjaga tanpa adanya intervensi dogmatis.

Keempat, instrumen solutif atas kemajemukan: konsep ini dirancang sebagai instrumen pemersatu untuk mengikat populasi Indonesia yang besar dari Sabang sampai Merauke, guna memastikan seluruh elemen bangsa tetap kokoh sebagai satu kesatuan Nusantara.

1.5.2 Empat Indikator Moderasi Beragama

Kementerian Agama menetapkan empat indikator atau standar keberhasilan moderasi beragama.

Pertama, sikap penerimaan terhadap konstitusi yang telah disepakati. Dibuktikan dengan menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang sejalan dengan butir-butir Pancasila dan UUD 1945, serta mengakui bahwa NKRI bukanlah negara teokratis maupun sekuler sehingga tidak memaksakan satu agama sebagai ideologi negara.

Kedua, membudayakan toleransi. Toleransi yang dimaksud moderasi beragama adalah bentuk toleransi kepada antar-agama dan intra-agama yang bukan sekadar menghargai dan menghormati pemeluk keyakinan yang berbeda, melainkan juga

turut aktif melakukan komunikasi, membangun kebersamaan dan kerja sama.

Ketiga, penolakan terhadap kekerasan, terutama kekerasan atas nama agama. Kekerasan atas nama agama hanya akan mencederai nilai luhur agama itu sendiri.

Keempat, penerimaan terhadap tradisi dan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Moderasi beragama menghargai keragaman budaya sebagai kekayaan bangsa.

1.5.3 Program dan Capaian

Sepanjang tahun 2025, BMBPSDM mencatat sejumlah capaian program moderasi beragama, antara lain: penguatan moderasi beragama bagi calon dai di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T); pelatihan bagi guru madrasah; serta pelatihan lintas kementerian dan lembaga yang diikuti 1.772 peserta.

Selain itu, pemerintah mengembangkan kampanye moderasi beragama di wilayah lintas agama dan budaya, pilot project bagi pimpinan sekolah, pengembangan Rumah Moderasi Beragama sebagai pusat kajian dan pelatihan, serta penguatan 1.000 Kelurahan Moderasi Beragama di berbagai daerah.

Kementerian Agama juga tengah mengembangkan sejumlah program strategis yang selaras dengan penguatan moderasi beragama, seperti program Ekoteologi, Kurikulum Berbasis Cinta, serta pemberdayaan ekonomi umat.

1.5.4 Koordinasi Lintas Sektor

Moderasi beragama merupakan kebijakan strategis nasional yang tidak dapat dijalankan oleh satu kementerian saja, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan. Pada tahun 2026, pemerintah membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Moderasi Beragama yang melibatkan berbagai kementerian koordinator, kementerian teknis, aparat penegak hukum, hingga unsur TNI dan Polri.

Forum koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan, instrumen pengukuran, serta perencanaan program lintas sektor agar sejalan dengan arah pembangunan nasional. Dengan koordinasi yang kuat, diharapkan penguatan moderasi beragama dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

1.5.5 Implikasi bagi Pendidikan Islam

Bagi lembaga pendidikan Islam, kebijakan moderasi beragama memiliki implikasi yang sangat konkret. Pendidikan Islam tidak hanya dituntut untuk mentransmisikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga untuk membentuk karakter peserta didik yang moderat, toleran, dan inklusif. Nilai-nilai moderasi perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum, metodologi pembelajaran, budaya sekolah, serta keteladanan guru.

Moderasi berlaku pada teologi, ibadah, etika, dan hukum, sehingga membentuk kerangka Islam yang inklusif dan berorientasi perdamaian.

Mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam pendidikan, dakwah, dan kebijakan adalah vital untuk melawan radikalisme, memperkuat toleransi, dan mempertahankan peran Islam sebagai rahmatan lil-'ālamīn (rahmat bagi seluruh alam). Inilah tantangan sekaligus peluang bagi pendidikan Islam di Indonesia: membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual dan spiritual, tetapi juga berkeadaban dalam menyikapi keragaman

BAB II

MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

2.1 Konsep Pendidikan Islam yang Rahmatan lil 'Alamin

2.1.1 Hakikat Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah proses pembinaan dan pengembangan seluruh potensi manusia—jasmani, rohani, intelektual, dan sosial—berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, agar terbentuk pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi diri, keluarga, masyarakat, serta bangsa. Pendidikan Islam tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi juga menanamkan nilai (transfer of values) dan membangun karakter (character building).

Dalam kerangka ini, pendidikan Islam bukan sekadar proses pengajaran, melainkan proses pembudayaan nilai. Ia menyentuh tiga ranah sekaligus: kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (perilaku). Ketika ketiga ranah ini berjalan seimbang, pendidikan Islam akan melahirkan pribadi yang utuh (insan kamil), yang tidak hanya tahu tentang kebaikan, tetapi juga mau dan mampu melakukannya.

2.1.2 Rahmatan lil-'Ālamīn sebagai Paradigma Pendidikan

Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil-'ālamīn). Prinsip ini termaktub dalam QS. Al-Anbiya' [21]: 107:

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam."

Ayat ini menegaskan bahwa misi kenabian Muhammad SAW bukan hanya untuk umat Islam, melainkan untuk seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk. Karena itu, pendidikan Islam harus diarahkan untuk mewujudkan misi rahmatan lil-'ālamīn tersebut.

Dalam praktiknya, konsep rahmatan lil-'ālamīn dalam pendidikan Islam mengandung beberapa konsekuensi penting. Pendidikan Islam harus bersifat inklusif, yakni terbuka bagi semua kalangan tanpa memandang latar belakang. Ia juga harus humanis, yakni menempatkan manusia sebagai makhluk mulia yang harus dihormati dan dilindungi. Selain itu, pendidikan Islam harus berorientasi pada kemaslahatan umum, yakni mendorong peserta didik untuk berkontribusi pada kebaikan bersama, bukan hanya bagi kelompoknya sendiri. Terakhir, pendidikan Islam harus menghargai keragaman sebagai sunnatullah yang tidak dapat dihindari.

2.1.3 Relevansi Rahmatan lil-'Ālamīn bagi Moderasi Beragama

Konsep rahmatan lil-'ālamīn memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan moderasi beragama. Keduanya menolak sikap ekstrem dan mengutamakan kemaslahatan bersama. Jika moderasi beragama menekankan keseimbangan

antara pengamalan agama sendiri dan penghormatan terhadap pemeluk agama lain, maka rahmatan lil-'ālamīn memperluas wawasan tersebut dengan menegaskan bahwa kehadiran Islam harus membawa kebaikan bagi seluruh alam, tanpa terkecuali.

Dengan demikian, pendidikan Islam yang berparadigma rahmatan lil-'ālamīn secara otomatis akan menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Peserta didik akan dididik untuk memahami bahwa keberislaman seseorang tidak diukur dari seberapa keras ia menolak yang lain, melainkan dari seberapa besar manfaat yang ia tebarkan bagi sesama.

2.2 Tujuan Pendidikan Islam dalam Membangun Sikap Moderat Al-Qur'an dan Hadis tentang Moderasi

2.2.1 Tujuan Umum Pendidikan Islam

Tujuan umum pendidikan Islam sebagaimana dirumuskan dalam berbagai literatur mencakup beberapa dimensi utama.

Dari dimensi spiritual, pendidikan Islam bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki hubungan yang kuat dengan Allah SWT, menjalankan ibadah dengan benar, dan menjauhi larangan-Nya.

Dari dimensi intelektual, pendidikan Islam bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan analitis dalam memahami ajaran agama dan realitas kehidupan.

Dari dimensi moral, pendidikan Islam bertujuan menanamkan akhlak mulia, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama.

Dari dimensi sosial, pendidikan Islam bertujuan membangun kesadaran akan pentingnya hidup bersama dalam keragaman, toleransi, dan kerja sama untuk kemaslahatan bersama.

Dalam konteks moderasi beragama, tujuan pendidikan Islam perlu diperluas untuk mencakup pembentukan sikap wasathiyah, yakni kemampuan bersikap seimbang, adil, dan toleran dalam beragama, serta mampu hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain.

2.2.2 Landasan Al-Qur'an dan Hadis tentang Tujuan Moderat

Tujuan pendidikan Islam untuk membangun sikap moderat memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. QS. Al-Baqarah [2]: 143 menegaskan posisi umat Islam sebagai ummatan wasathan (umat pertengahan), yang menjadi saksi atas manusia. Status ini mengandung konsekuensi bahwa umat Islam harus menjadi teladan dalam keadilan dan keseimbangan.

Selain itu, QS. Al-Hujurat [49]: 13 menegaskan bahwa keragaman adalah desain Ilahi:

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa."

Ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk bermusuhan, melainkan untuk saling mengenal (li ta'ārafū). Pendidikan Islam harus

mampu menanamkan kesadaran ini kepada peserta didik.

Dari Hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda:
"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain." (HR. Ahmad)
Hadis ini menegaskan bahwa kemuliaan seseorang diukur dari manfaat yang ia berikan, bukan dari identitas kelompoknya. Inilah inti dari sikap moderat yang harus ditanamkan dalam pendidikan Islam.

2.2.3 Indikator Keberhasilan Pendidikan Islam Moderat

Keberhasilan pendidikan Islam dalam membangun sikap moderat dapat diukur melalui beberapa indikator. Peserta didik mampu menerima perbedaan pendapat dan keyakinan dengan lapang dada. Mereka juga memiliki kemampuan berdialog secara santun dengan pemeluk agama lain. Selain itu, peserta didik menunjukkan sikap menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama. Mereka juga aktif terlibat dalam kegiatan sosial lintas kelompok. Terakhir, peserta didik memiliki komitmen yang kuat terhadap persatuan bangsa dan negara.

Indikator-indikator ini sejalan dengan empat indikator moderasi beragama yang ditetapkan Kementerian Agama, yakni penerimaan konstitusi, toleransi, penolakan kekerasan, dan penerimaan tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan agama.

2.3 Nilai-Nilai Moderasi dalam Kurikulum Pendidikan Islam

2.3.1 Prinsip Integrasi Nilai Moderasi

Integrasi nilai-nilai moderasi dalam kurikulum pendidikan Islam tidak berarti menambah mata pelajaran baru secara khusus. Sebaliknya, nilai-nilai moderasi diintegrasikan ke dalam seluruh mata pelajaran yang sudah ada, baik melalui materi, metode, maupun evaluasi.

Prinsip utama integrasi ini adalah bahwa moderasi bukanlah topik yang berdiri sendiri, melainkan ruh yang menjiwai seluruh proses pendidikan. Nilai-nilai moderasi harus hadir dalam setiap interaksi pembelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas.

2.3.2 Nilai-Nilai Utama Moderasi

Terdapat beberapa nilai utama moderasi yang perlu diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan Islam.

Nilai *tawassuth* (jalan tengah) mengajarkan peserta didik untuk tidak berlebihan dalam beragama dan tidak pula meremehkan ajaran agama. Nilai ini menuntut keseimbangan dalam beribadah, berpikir, dan bersikap.

Nilai *tawāzun* (keseimbangan) mengajarkan peserta didik untuk menyeimbangkan antara aspek duniawi dan ukhrawi, antara hak dan kewajiban, antara individual dan sosial.

Nilai *i'tidāl* (keadilan) mengajarkan peserta didik untuk bersikap adil terhadap semua orang, tanpa memandang perbedaan keyakinan, suku, atau golongan.

Nilai *tasāmuh* (toleransi) mengajarkan peserta didik untuk menghargai perbedaan dan hidup

berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain.

Nilai syūrā (musyawarah) mengajarkan peserta didik untuk menyelesaikan perbedaan pendapat melalui dialog dan musyawarah, bukan kekerasan atau paksaan.

2.3.3 Implementasi dalam Mata Pelajaran

Integrasi nilai-nilai moderasi dapat dilakukan dalam berbagai mata pelajaran pendidikan Islam. Dalam mata pelajaran Al-Qur'an dan Hadis, nilai moderasi dapat diintegrasikan melalui kajian ayat-ayat dan hadis-hadis yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan toleransi.

Dalam mata pelajaran Akidah Akhlak, nilai moderasi dapat diintegrasikan melalui pembahasan tentang akhlak mulia, sikap adil, dan penghormatan terhadap sesama.

Dalam mata pelajaran Fikih, nilai moderasi dapat diintegrasikan melalui pembahasan tentang kemudahan agama, penolakan sikap berlebihan, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat.

Dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, nilai moderasi dapat diintegrasikan melalui kajian tentang teladan Nabi dan para sahabat dalam bersikap toleran terhadap pemeluk agama lain.

Dengan integrasi semacam ini, nilai-nilai moderasi tidak hanya menjadi pengetahuan kognitif, tetapi juga menjadi bagian dari pengalaman belajar peserta didik sehari-hari.

2.4 Peran Lembaga Pendidikan Islam sebagai Agen Moderasi

2.4.1 Lembaga Pendidikan sebagai Pusat Penguatan Moderasi

Lembaga pendidikan Islam—madrasah, pesantren, sekolah Islam, dan perguruan tinggi Islam—memiliki tanggung jawab besar dalam mengembangkan budaya moderasi. Lembaga pendidikan bukan hanya tempat mentransfer ilmu, tetapi juga tempat membentuk karakter dan membangun peradaban.

Sebagai agen moderasi, lembaga pendidikan Islam perlu menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuhnya sikap toleran, inklusif, dan berkeadaban. Ekosistem ini mencakup kebijakan sekolah, kurikulum, metodologi pembelajaran, budaya sekolah, serta keteladanan guru.

2.4.2 Strategi Lembaga Pendidikan dalam Menanamkan Moderasi

Beberapa strategi yang dapat dilakukan lembaga pendidikan Islam dalam menanamkan moderasi antara lain sebagai berikut. Lembaga pendidikan perlu menetapkan kebijakan sekolah yang menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi, misalnya melalui kode etik peserta didik dan guru yang mencerminkan sikap toleran dan inklusif. Lembaga pendidikan juga perlu mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan nilai moderasi ke dalam seluruh mata pelajaran, sebagaimana telah diuraikan pada subbab sebelumnya.

Selain itu, lembaga pendidikan perlu menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang

mendorong kerja sama lintas kelompok, misalnya melalui kegiatan sosial, bakti masyarakat, atau dialog lintas agama. Lembaga pendidikan juga perlu membangun kerja sama dengan lembaga keagamaan dan masyarakat luas, sehingga nilai-nilai moderasi tidak hanya dipraktikkan di sekolah, tetapi juga di lingkungan sekitar. Terakhir, lembaga pendidikan perlu menyediakan ruang dialog dan musyawarah untuk menyelesaikan perbedaan, sehingga peserta didik terbiasa menyelesaikan konflik dengan cara damai.

2.4.3 Pesantren sebagai Garda Terdepan Moderasi

Pesantren memiliki tradisi panjang dalam mengajarkan Islam yang moderat, toleran, dan menghargai keragaman. Nilai-nilai wasathiyyah telah menjadi bagian dari kurikulum pesantren melalui kajian kitab kuning, akhlak, dan tasawuf. Pesantren juga memiliki peran penting dalam menangkal radikalisme dan ekstremisme, serta dalam membangun kerukunan umat.

Kiai dan ustaz di pesantren memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk cara berpikir dan bersikap santri. Karena itu, penguatan moderasi beragama di pesantren sangat strategis dalam membangun generasi yang toleran, inklusif, dan berkeadaban.

2.5 Integrasi Moderasi Beragama dalam Visi-Misi Pendidikan Islam

2.5.1 Pentingnya Visi-Misi sebagai Arah Pendidikan

Visi dan misi merupakan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan. Tanpa visi-misi yang jelas, pendidikan akan berjalan tanpa arah dan mudah terombang-ambing oleh berbagai kepentingan.

Dalam konteks moderasi beragama, visi-misi pendidikan Islam perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai moderasi. Visi-misi ini kemudian menjadi dasar bagi seluruh kebijakan, program, dan kegiatan lembaga pendidikan.

2.5.2 Merumuskan Visi-Misi Berbasis Moderasi

Visi pendidikan Islam berbasis moderasi dapat dirumuskan misalnya sebagai berikut: "Terwujudnya generasi Islam yang beriman, bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, serta mampu hidup berdampingan secara damai dalam keragaman."

Sedangkan misi pendidikan Islam berbasis moderasi dapat mencakup beberapa poin berikut. Menyelenggarakan pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum secara seimbang. Menanamkan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan inklusivitas dalam seluruh proses pendidikan. Mengembangkan budaya sekolah yang menghargai keragaman dan menjunjung tinggi keadilan. Mendorong peserta didik untuk aktif berkontribusi pada kemaslahatan masyarakat luas. Serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan pendidikan Islam yang rahmatan lil-'ālamīn.

2.5.3 Implementasi Visi-Misi dalam Praktik Pendidikan

Visi-misi yang telah dirumuskan harus diimplementasikan dalam praktik pendidikan sehari-hari. Implementasi ini mencakup beberapa aspek.

Aspek kurikulum: materi pembelajaran disusun untuk mengintegrasikan nilai-nilai moderasi. Aspek metode: pembelajaran dilakukan dengan pendekatan yang dialogis, partisipatif, dan menghargai perbedaan. Aspek budaya sekolah: lingkungan sekolah diciptakan agar kondusif bagi tumbuhnya sikap toleran dan inklusif. Aspek keteladanan: guru dan tenaga kependidikan memberikan contoh nyata dalam bersikap moderat. Aspek evaluasi: penilaian tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku moderat peserta didik.

Dengan implementasi yang konsisten, visi-misi pendidikan Islam berbasis moderasi akan menjadi kenyataan, bukan sekadar slogan di dinding sekolah.

BAB III

TOLERANSI, TASAMUH, TAWASSUTH, DAN TAWAZUN

3.1 Konsep Tasamuh (Toleransi) dalam Islam

3.1.1 Pengertian Tasāmuh

Secara bahasa, tasāmuh berasal dari akar kata Arab samaha yang berarti mudah, lapang, dan tidak sempit. Dari akar kata yang sama lahir istilah musāmahah (saling memaafkan) dan tasāmuh (toleransi). Dalam pengertian istilah, tasāmuh berarti sikap lapang dada dalam menghadapi perbedaan, baik perbedaan pendapat, keyakinan, budaya, maupun cara pandang.

Toleransi dalam Islam bukanlah sikap mengakui kebenaran semua agama, melainkan sikap menghormati hak setiap orang untuk memeluk dan menjalankan keyakinannya masing-masing, tanpa memaksa atau mengganggu. Toleransi beragama menuntut sikap saling menghargai antar pemeluk agama yang berbeda, tanpa mencampurkan ajaran agama.

3.1.2 Landasan Tasāmuh dalam Al-Qur'an dan Hadis

Landasan utama toleransi dalam Islam terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 256:

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat."

Ayat ini menegaskan prinsip kebebasan beragama. Islam tidak pernah memaksa siapa pun untuk memeluknya. Dakwah dilakukan dengan cara yang baik dan santun, bukan dengan paksaan atau kekerasan.

Landasan lainnya adalah QS. Al-Kafirun [109]: 6:

"Untukmu agamamu, dan untukku agamaku."

Ayat ini menegaskan batas toleransi dalam Islam: umat Islam menghormati keyakinan orang lain, tetapi tidak mencampuradukkan keyakinan mereka sendiri dengan keyakinan orang lain.

Dari Hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Barangsiapa menyakiti seorang kafir dzimmi, maka ia menyakitiku, dan barangsiapa menyakitiku, maka ia menyakiti Allah." (HR. Ath-Thabrani).

Hadis ini menegaskan bahwa toleransi dalam Islam bukan hanya terhadap sesama muslim, tetapi juga terhadap non-muslim yang hidup berdampingan secara damai.

3.1.3 Batas-Batas Toleransi

Toleransi dalam Islam memiliki batas-batas yang jelas. Toleransi bukan berarti mengakui kebenaran semua agama, karena akidah Islam menegaskan bahwa hanya Islam yang diterima di sisi Allah (QS. Ali Imran [3]: 19). Toleransi juga bukan berarti mengikuti ritual ibadah agama lain, karena Nabi melarang umatnya menyerupai ritual ibadah agama

lain. Toleransi juga bukan berarti mencampuradukkan ajaran agama (syncretism), karena hal itu bertentangan dengan prinsip tauhid.

Dengan demikian, toleransi dalam Islam adalah sikap menghormati hak orang lain untuk berkeyakinan dan beribadah sesuai agamanya, tanpa mengorbankan prinsip akidah dan syariat Islam sendiri.

3.1.4 Toleransi dalam Kehidupan Sehari-hari

Toleransi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kehidupan sehari-hari. Misalnya, menghormati tetangga yang berbeda agama, tidak mengganggu ibadah mereka, dan membantu mereka dalam urusan sosial kemasyarakatan. Toleransi juga dapat diwujudkan dengan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, serta berdialog secara santun jika ada perbedaan pendapat.

Dalam konteks pendidikan Islam, toleransi harus ditanamkan sejak dini melalui keteladanan guru, pembiasaan di sekolah, dan materi pembelajaran yang menekankan penghormatan terhadap keragaman.

3.2 Tawassuth (Sikap Tengah-Tengah) sebagai Prinsip Beragama

3.2.1 Pengertian Tawassuth

Tawassuth berasal dari akar kata Arab *wasatha* yang berarti tengah atau pertengahan. Dalam istilah, *tawassuth* berarti sikap mengambil jalan tengah dalam beragama, tidak berlebihan (*ghuluw*) dan tidak pula meremehkan (*tafrīth*). Sikap ini

merupakan inti dari wasathiyyah atau moderasi beragama.

Tawassuth bukanlah sikap ragu-ragu atau tidak berpihak. Sebaliknya, tawassuth adalah sikap yang tegas dalam kebenaran, tetapi disampaikan dengan cara yang seimbang dan penuh hikmah. Sikap ini menolak ekstremisme dalam segala bentuknya, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri.

3.2.2 Landasan Tawassuth dalam Al-Qur'an dan Hadis

Landasan utama tawassuth terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 143 yang telah dibahas pada bab sebelumnya, yaitu posisi umat Islam sebagai ummatan wasathan (umat pertengahan). Status ini menuntut umat Islam untuk menjadi teladan dalam keadilan dan keseimbangan.

Landasan lainnya adalah QS. Al-Qalam [68]: 28 yang menyinggung sikap pertengahan dalam urusan duniawi. Selain itu, terdapat banyak hadis yang menekankan sikap moderat, seperti hadis tentang larangan berlebihan dalam beribadah hingga melampaui batas kemampuan.

3.2.3 Tawassuth dalam Berbagai Aspek Kehidupan

Tawassuth harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan beragama. Dalam aspek akidah, tawassuth berarti menegaskan tauhid yang murni, tanpa terjerumus pada ateisme atau politeisme, serta tanpa terjerumus pada takhayul dan khurafat.

Dalam aspek ibadah, tawassuth berarti menjalankan ibadah sesuai tuntunan Nabi, tanpa

menambah-nambahi (bid'ah) dan tanpa mengurangi (tafrīth). Ibadah dilakukan dengan khushyuk dan istiqamah, tetapi tetap memperhatikan kemampuan dan kondisi.

Dalam aspek akhlak, tawassuth berarti bersikap seimbang antara tegas dan lembut, antara pemaaf dan pemberani, antara sederhana dan cukup. Dalam aspek muamalah, tawassuth berarti bersikap adil dalam berinteraksi dengan sesama, tidak berlebihan dalam mengejar dunia, tetapi juga tidak mengabaikan tanggung jawab duniawi.

3.2.4 Tawassuth sebagai Solusi atas Ekstremisme

Salah satu fungsi utama tawassuth adalah sebagai solusi atas ekstremisme beragama. Ekstremisme lahir dari sikap berlebihan dalam memahami dan menjalankan ajaran agama, yang kemudian melahirkan sikap fanatik, intoleran, dan bahkan kekerasan.

Dengan tawassuth, umat Islam diajak untuk memahami agama secara utuh dan seimbang, tidak hanya berpegang pada satu teks secara tekstual, tetapi juga memperhatikan konteks dan maqasid syariah. Sikap ini akan melahirkan keberagamaan yang inklusif, toleran, dan penuh kasih sayang.

3.3 Tawazun (Keseimbangan) dalam Kehidupan Sosial dan Beragama

3.3.1 Pengertian Tawāzun

Tawāzun berasal dari akar kata Arab wazana yang berarti menimbang atau menyeimbangkan. Dalam istilah, tawāzun berarti sikap seimbang dalam segala

hal, tidak berat sebelah, dan tidak condong pada satu sisi secara berlebihan.

Tawāzun dalam Islam mencakup keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara jasmani dan rohani, antara individu dan sosial, antara hak dan kewajiban, serta antara akal dan wahyu.

3.3.2 Landasan Tawāzun dalam Al-Qur'an dan Hadis

Landasan utama tawāzun terdapat dalam QS. Al-Qashash [28]: 77:

"Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia ini."

Ayat ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara orientasi akhirat dan kehidupan dunia. Seorang muslim tidak boleh hanya mengejar akhirat dengan mengabaikan dunia, dan sebaliknya tidak boleh hanya mengejar dunia dengan mengabaikan akhirat.

Landasan lainnya adalah QS. Al-Furqan [25]: 67 yang menyinggung sikap pertengahan dalam membelanjakan harta, tidak boros dan tidak kikir. Selain itu, Nabi Muhammad SAW mencontohkan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari, antara beribadah, bekerja, beristirahat, dan berinteraksi dengan keluarga.

3.3.3 Tawāzun dalam Kehidupan Sosial

Dalam kehidupan sosial, tawāzun berarti menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, serta antara kebebasan dan tanggung jawab.

Seorang muslim yang tawāzun tidak akan menuntut haknya secara berlebihan tanpa memenuhi kewajibannya. Ia juga tidak akan mengutamakan kepentingan pribadinya di atas kepentingan umum. Ia menyadari bahwa kebebasan yang dimilikinya dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain.

Dalam konteks bermasyarakat, tawāzun mendorong terciptanya keadilan sosial, kerukunan, dan kerja sama yang saling menguntungkan. Sikap ini menolak segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, dan ketidakadilan.

3.3.4 Tawāzun dalam Kehidupan Beragama

Dalam kehidupan beragama, tawāzun berarti menjaga keseimbangan antara aspek lahir dan batin, antara syariat dan hakikat, antara ilmu dan amal, serta antara akal dan wahyu. Seorang muslim yang tawāzun tidak hanya mementingkan aspek lahiriah ibadah, tetapi juga menghidupkan aspek batiniahnya. Ia tidak hanya mengejar ilmu, tetapi juga mengamalkannya. Ia tidak hanya berpegang pada teks, tetapi juga menggunakan akalnya untuk memahami konteks. Dengan tawāzun, keberagamaan seseorang menjadi utuh, tidak pincang, dan tidak berat sebelah. Sikap ini melahirkan pribadi yang matang, dewasa, dan bijaksana dalam menyikapi berbagai persoalan kehidupan.

3.4 I'tidal (Tegak Lurus) dan Musawah (Kesetaraan) sebagai Pelengkap Moderasi

3.4.1 I'tidāl: Tegak Lurus dalam Keadilan

I'tidāl berasal dari akar kata Arab 'adala yang berarti adil atau tegak lurus. Dalam istilah, i'tidāl berarti sikap tegak lurus dalam kebenaran dan keadilan, tidak condong pada satu pihak secara tidak adil.

I'tidāl menuntut seseorang untuk bersikap objektif dan tidak memihak kepada siapa pun kecuali kepada kebenaran. Ia tidak boleh membela seseorang hanya karena ia berasal dari kelompok yang sama, dan tidak boleh menyerang seseorang hanya karena ia berasal dari kelompok yang berbeda.

Landasan i'tidāl terdapat dalam QS. Al-Maidah [5]: 8:

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan bahkan terhadap orang yang kita benci sekalipun. Inilah puncak dari sikap moderat yang diajarkan Islam.

3.4.2 Musāwah: Kesetaraan dalam Kemanusiaan

Musāwah berasal dari akar kata Arab sawiya yang berarti sama atau setara. Dalam istilah, musāwah berarti prinsip kesetaraan manusia di hadapan Allah dan hukum, tanpa membedakan suku, ras, warna kulit, atau status sosial.

Islam menegaskan bahwa semua manusia berasal dari satu keturunan, yaitu Adam dan Hawa. Kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak diukur dari

asal-usul, kekayaan, atau kedudukannya, melainkan dari ketakwaannya (QS. Al-Hujurat [49]: 13).

Prinsip musāwah menuntut penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk hidup layak, mendapatkan pendidikan, mengekspresikan pendapat, dan beribadah sesuai keyakinannya.

3.4.3 Keterkaitan I'tidāl dan Musāwah dengan Moderasi

I'tidāl dan musāwah merupakan pelengkap penting bagi moderasi beragama. Tanpa i'tidāl, moderasi bisa berubah menjadi sikap tidak berpihak yang pasif. Tanpa musāwah, moderasi bisa berubah menjadi sikap yang mempertahankan ketidakadilan atas nama keseimbangan.

Dengan i'tidāl dan musāwah, moderasi beragama menjadi sikap yang aktif memperjuangkan keadilan dan kesetaraan, tanpa terjebak pada ekstremisme atau sikap tidak peduli.

3.5 Implementasi Empat Pilar Moderasi dalam Kehidupan Sehari-hari

3.5.1 Empat Pilar Moderasi

Empat pilar moderasi yang telah dibahas—tasāmuh, tawassuth, tawāzun, dan i'tidāl (dilengkapi musāwah)—merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Keempatnya tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Tasāmuh tanpa tawassuth bisa menjadi sikap mengakui semua kebenaran. Tawassuth tanpa i'tidāl bisa menjadi sikap tidak berpihak. Tawāzun tanpa musāwah bisa menjadi sikap mempertahankan ketidakadilan.

Karena itu, implementasi moderasi dalam kehidupan sehari-hari harus mencakup keempat pilar tersebut secara utuh.

3.5.2 Implementasi dalam Keluarga

Dalam keluarga, moderasi dapat diimplementasikan melalui beberapa cara berikut. Orang tua menanamkan nilai toleransi kepada anak-anak sejak dini, misalnya dengan menghormati perbedaan pendapat di dalam keluarga. Orang tua juga bersikap adil terhadap semua anak, tanpa membedakan jenis kelamin atau kemampuan. Selain itu, orang tua menyeimbangkan antara tuntutan duniawi dan ukhrawi dalam mendidik anak. Terakhir, orang tua menjadi teladan dalam bersikap moderat, baik dalam beribadah maupun dalam berinteraksi dengan tetangga yang berbeda agama.

3.5.3 Implementasi dalam Lingkungan Sekolah

Di lingkungan sekolah, moderasi dapat diimplementasikan melalui beberapa langkah berikut. Guru menciptakan suasana kelas yang inklusif dan menghargai perbedaan. Sekolah menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan peserta didik dari berbagai latar belakang. Kurikulum dan pembelajaran mengintegrasikan nilai-nilai moderasi. Sekolah juga menyediakan ruang dialog untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Selain itu, sekolah menjalin kerja sama dengan lembaga keagamaan dan masyarakat luas untuk memperkuat nilai moderasi.

3.5.4 Implementasi dalam Masyarakat

Di lingkungan masyarakat, moderasi dapat diimplementasikan melalui beberapa bentuk berikut. Warga saling menghormati perbedaan keyakinan dan tidak mengganggu ibadah pemeluk agama lain. Warga bekerja sama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, tanpa memandang perbedaan agama. Warga menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan dialog, bukan kekerasan. Warga juga memperjuangkan keadilan sosial bagi semua orang, tanpa diskriminasi. Selain itu, warga aktif menangkal radikalisme dan ekstremisme di lingkungan masing-masing.

3.5.5 Implementasi dalam Media Sosial

Di era digital, moderasi juga harus diimplementasikan dalam media sosial. Pengguna media sosial hendaknya menyebarkan konten yang menyejukkan dan mempererat persaudaraan, bukan konten yang memicu kebencian dan permusuhan. Mereka juga harus menghindari ujaran kebencian, hoaks, dan provokasi yang dapat memecah belah masyarakat. Selain itu, pengguna media sosial perlu bersikap kritis terhadap informasi yang diterima, serta memverifikasi kebenarannya sebelum menyebarkan. Mereka juga dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan moderasi, toleransi, dan perdamaian.

Dengan implementasi yang konsisten di berbagai lingkungan, empat pilar moderasi akan menjadi budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia, sehingga tercipta generasi yang toleran, inklusif, dan berkeadaban.

BAB IV

PENDIDIKAN ISLAM DAN PEMBENTUKAN KARAKTER MODERAT

4.1 Konsep Pendidikan Karakter dalam Islam

4.1.1 Pengertian Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter adalah proses pembinaan nilai-nilai moral dan etika secara sistematis kepada peserta didik, agar nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari kepribadian dan perilakunya sehari-hari. Dalam Islam, pendidikan karakter identik dengan pembinaan akhlak, yakni upaya membentuk manusia yang berakhlak mulia sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah.

Pendidikan karakter bukan sekadar mengajarkan pengetahuan tentang baik dan buruk, melainkan menanamkan nilai-nilai tersebut hingga menjadi kebiasaan dan karakter yang melekat. Ia menyentuh tiga ranah sekaligus: pengetahuan (knowing), perasaan (feeling), dan tindakan (action).

4.1.2 Landasan Pendidikan Karakter dalam Islam

Landasan utama pendidikan karakter dalam Islam adalah misi kenabian Muhammad SAW, yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi bersabda:

"Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." (HR. Ahmad)

Hadis ini menegaskan bahwa inti dari misi kenabian adalah pembinaan akhlak. Karena itu, pendidikan Islam harus menempatkan pembinaan karakter sebagai tujuan utamanya, bukan sekadar transfer pengetahuan.

Landasan lainnya adalah QS. Al-Qalam [68]: 4 yang memuji akhlak Nabi:

"Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung."

Ayat ini menunjukkan bahwa akhlak mulia adalah bagian tak terpisahkan dari kepribadian seorang muslim.

4.1.3 Karakter Moderat sebagai Bagian dari Akhlak Mulia

Karakter moderat merupakan salah satu wujud akhlak mulia. Seseorang yang berkarakter moderat mampu bersikap seimbang, adil, toleran, dan tidak berlebihan dalam segala hal. Ia tidak mudah terprovokasi, tidak fanatik, dan tidak ekstrem dalam bersikap.

Dalam konteks pendidikan Islam, karakter moderat harus menjadi salah satu tujuan utama pembinaan peserta didik. Ini sejalan dengan visi pendidikan Islam yang tidak hanya mencetak lulusan yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia dan berkeadaban.

4.1.4 Indikator Karakter Moderat

Beberapa indikator yang menunjukkan bahwa peserta didik memiliki karakter moderat antara lain

sebagai berikut. Peserta didik bersikap terbuka terhadap perbedaan pendapat dan keyakinan. Mereka mampu berdialog secara santun dengan pemeluk agama lain. Mereka juga menolak segala bentuk kekerasan dan ekstremisme. Selain itu, mereka aktif terlibat dalam kegiatan sosial lintas kelompok. Terakhir, peserta didik menunjukkan komitmen yang kuat terhadap persatuan dan keadilan.

Indikator-indikator ini sejalan dengan empat indikator moderasi beragama yang ditetapkan Kementerian Agama, yakni penerimaan konstitusi, toleransi, penolakan kekerasan, dan penerimaan tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan agama.

4.2 Strategi Pembentukan Karakter Moderat melalui Pendidikan Formal

4.2.1 Integrasi Nilai Moderasi dalam Kurikulum

Strategi pertama dalam membentuk karakter moderat adalah mengintegrasikan nilai-nilai moderasi ke dalam kurikulum pendidikan formal. Integrasi ini tidak berarti menambah mata pelajaran baru, melainkan menanamkan nilai moderasi dalam seluruh mata pelajaran yang ada.

Dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, nilai moderasi dapat diintegrasikan melalui kajian ayat-ayat dan hadis-hadis yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan toleransi. Dalam mata pelajaran umum, nilai moderasi dapat diintegrasikan melalui pembahasan tentang keragaman budaya, sejarah peradaban, dan kewarganegaraan.

4.2.2 Pengembangan Budaya Sekolah yang Inklusif

Strategi kedua adalah mengembangkan budaya sekolah yang inklusif dan menghargai perbedaan. Budaya sekolah mencakup nilai-nilai, norma, kebiasaan, dan interaksi yang terjadi di lingkungan sekolah. Jika budaya sekolah dibangun atas dasar toleransi dan penghormatan terhadap keragaman, maka peserta didik akan terbiasa bersikap moderat dalam kehidupan sehari-hari.

Budaya sekolah yang inklusif dapat diwujudkan melalui kebijakan sekolah yang menjunjung tinggi keadilan, kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan semua peserta didik, serta keteladanan guru dan tenaga kependidikan dalam bersikap moderat.

4.2.3 Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Kelompok

Strategi ketiga adalah menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan peserta didik dari berbagai latar belakang. Kegiatan semacam ini dapat berupa bakti sosial, dialog lintas agama, kunjungan ke tempat ibadah agama lain, atau kegiatan seni dan budaya yang menampilkan keragaman.

Melalui kegiatan semacam ini, peserta didik dapat mengalami secara langsung indahnya keragaman dan pentingnya kerja sama lintas kelompok. Pengalaman ini akan membekas lebih kuat daripada sekadar teori di dalam kelas.

4.2.4 Pemanfaatan Media dan Teknologi

Strategi keempat adalah memanfaatkan media dan teknologi untuk menyebarkan pesan moderasi.

Di era digital, peserta didik sangat akrab dengan media sosial dan internet. Karena itu, pendidikan karakter moderat harus memanfaatkan media ini untuk menyampaikan pesan-pesan toleransi, perdamaian, dan antikekerasan.

Sekolah dapat mengembangkan konten digital yang berisi pesan moderasi, mengadakan lomba karya digital bertema moderasi, atau membentuk komunitas digital yang menyebarkan pesan perdamaian. Dengan demikian, karakter moderat peserta didik tidak hanya terbentuk di dunia nyata, tetapi juga di dunia digital.

4.3 Peran Guru PAI sebagai Teladan Moderasi Beragama

4.3.1 Guru sebagai Uswah Hasanah

Dalam Islam, guru memiliki kedudukan yang sangat mulia. Guru bukan hanya penyampai ilmu, tetapi juga teladan (*uswah hasanah*) bagi peserta didiknya. Karena itu, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam membentuk karakter moderat peserta didik.

Guru PAI harus menjadi contoh nyata dalam bersikap moderat. Ia tidak boleh hanya mengajarkan teori tentang toleransi, tetapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap guru PAI akan menjadi cermin bagi peserta didiknya.

4.3.2 Kompetensi Guru PAI dalam Moderasi Beragama

Untuk dapat menjalankan perannya sebagai teladan moderasi, guru PAI perlu memiliki beberapa

kompetensi berikut. Guru PAI perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep wasathhiyyah dan nilai-nilai moderasi. Ia juga perlu memiliki kemampuan mengintegrasikan nilai moderasi dalam mata pelajaran yang diampu. Selain itu, guru PAI perlu memiliki keterampilan mengelola kelas yang beragam dan inklusif. Ia juga perlu memiliki kemampuan menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik antarpeserta didik. Terakhir, guru PAI perlu memiliki komitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri.

4.3.3 Tantangan Guru PAI dalam Menanamkan Moderasi

Guru PAI menghadapi berbagai tantangan dalam menanamkan moderasi beragama. Tantangan-tantangan tersebut antara lain sebagai berikut. Pengaruh media sosial yang menyebarkan konten radikal dan ekstrem. Lingkungan keluarga dan masyarakat yang mungkin tidak mendukung nilai moderasi. Keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pembelajaran. Serta adanya tekanan dari kelompok tertentu yang tidak sepakat dengan nilai moderasi.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, guru PAI perlu memiliki keteguhan iman, wawasan yang luas, serta dukungan dari sekolah, keluarga, dan masyarakat.

4.3.4 Kolaborasi Guru PAI dengan Berbagai Pihak

Guru PAI tidak dapat bekerja sendiri dalam menanamkan moderasi beragama. Ia perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti kepala

sekolah, guru mata pelajaran lain, orang tua peserta didik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kolaborasi ini penting agar pesan moderasi yang disampaikan di sekolah selaras dengan apa yang diterima peserta didik di rumah dan masyarakat.

4.4 Metode Pembiasaan dan Keteladanan dalam Membentuk Sikap Moderat

4.4.1 Metode Pembiasaan

Metode pembiasaan (habituation) adalah metode pendidikan karakter yang dilakukan dengan cara membiasakan peserta didik melakukan perilaku-perilaku baik secara berulang-ulang, sehingga perilaku tersebut menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi karakter.

Dalam membentuk sikap moderat, metode pembiasaan dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut. Membiasakan peserta didik untuk menghargai perbedaan pendapat dalam diskusi kelas. Membiasakan peserta didik untuk bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakang. Membiasakan peserta didik untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai. Serta membiasakan peserta didik untuk terlibat dalam kegiatan sosial lintas kelompok.

4.4.2 Metode Keteladanan

Metode keteladanan (uswah) adalah metode pendidikan karakter yang dilakukan dengan cara memberikan contoh nyata kepada peserta didik. Dalam Islam, metode ini sangat ditekankan, karena manusia cenderung belajar dari apa yang dilihat, bukan hanya dari apa yang didengar.

Keteladanan dalam membentuk sikap moderat dapat diberikan oleh guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan bahkan peserta didik yang lebih senior. Keteladanan ini mencakup sikap adil, toleran, sabar, dan bijaksana dalam menghadapi perbedaan.

4.4.3 Sinergi antara Pembiasaan dan Keteladanan

Metode pembiasaan dan keteladanan harus berjalan sinergis. Pembiasaan tanpa keteladanan akan terasa hampa, karena peserta didik tidak melihat contoh nyata dari apa yang diajarkan. Sebaliknya, keteladanan tanpa pembiasaan akan sulit membekas, karena peserta didik tidak diberi kesempatan untuk mempraktikkannya.

Sinergi antara pembiasaan dan keteladanan akan melahirkan karakter moderat yang kuat dan melekat pada peserta didik.

4.4.4 Peran Lingkungan dalam Pembiasaan dan Keteladanan

Lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam pembiasaan dan keteladanan. Lingkungan yang kondusif akan memperkuat nilai-nilai moderasi yang ditanamkan di sekolah. Sebaliknya, lingkungan yang tidak kondusif akan melemahkan nilai-nilai tersebut.

Karena itu, sekolah perlu menjalin kerja sama dengan keluarga dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan karakter moderat peserta didik.

4.5 Evaluasi Pembentukan Karakter Moderat Peserta Didik

4.5.1 Pentingnya Evaluasi dalam Pendidikan Karakter

Evaluasi merupakan bagian penting dari pendidikan karakter. Tanpa evaluasi, sekolah tidak akan mengetahui apakah program pembentukan karakter moderat berjalan efektif atau tidak. Evaluasi juga menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan program selanjutnya.

Evaluasi pendidikan karakter tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Artinya, evaluasi harus mencakup pengetahuan peserta didik tentang moderasi, sikap mereka terhadap moderasi, dan perilaku mereka dalam mempraktikkan moderasi.

4.5.2 Instrumen Evaluasi Karakter Moderat

Beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk mengevaluasi karakter moderat peserta didik antara lain sebagai berikut. Observasi perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Wawancara dengan peserta didik, guru, dan orang tua. Kuesioner yang mengukur sikap dan pandangan peserta didik tentang moderasi. Portofolio yang berisi karya dan aktivitas peserta didik terkait moderasi. Serta penilaian diri dan penilaian antarteman.

4.5.3 Indikator Keberhasilan Pembentukan Karakter Moderat

Keberhasilan pembentukan karakter moderat peserta didik dapat diukur melalui beberapa

indikator berikut. Peserta didik menunjukkan sikap terbuka terhadap perbedaan. Mereka mampu berkomunikasi secara santun dengan pemeluk agama lain. Mereka menolak segala bentuk kekerasan dan ekstremisme. Mereka aktif terlibat dalam kegiatan sosial lintas kelompok. Serta mereka menunjukkan komitmen yang kuat terhadap persatuan dan keadilan.

4.5.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi harus ditindaklanjuti dengan berbagai upaya perbaikan. Jika ditemukan peserta didik yang masih menunjukkan sikap intoleran atau ekstrem, sekolah perlu memberikan pembinaan khusus. Jika ditemukan kelemahan dalam program pembentukan karakter moderat, sekolah perlu melakukan revisi dan pengembangan.

Tindak lanjut ini penting agar pembentukan karakter moderat peserta didik tidak berhenti pada evaluasi, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan yang nyata.

4.5.5 Evaluasi sebagai Proses Berkelanjutan

Evaluasi pembentukan karakter moderat harus dipandang sebagai proses berkelanjutan, bukan kegiatan sekali jadi. Karakter moderat tidak terbentuk dalam waktu singkat, melainkan melalui proses panjang dan berulang. Karena itu, evaluasi harus dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.

Dengan evaluasi yang berkelanjutan, sekolah dapat memastikan bahwa upaya pembentukan karakter moderat peserta didik benar-benar

berjalan efektif dan memberikan hasil yang diharapkan.

BAB V

PENGUATAN SIKAP INKLUSIF DALAM PEMBELAJARAN PAI

5.1 Konsep Inklusivitas dalam Pendidikan Agama Islam

5.1.1 Pengertian Inklusivitas

Inklusivitas berasal dari kata "inklusi" yang berarti keterlibatan atau penyertaan. Dalam konteks pendidikan, inklusivitas berarti sikap terbuka untuk menerima dan melibatkan semua peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, suku, kemampuan, jenis kelamin, atau status sosial. Inklusivitas menolak segala bentuk diskriminasi dan marginalisasi.

Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), inklusivitas berarti sikap terbuka untuk memahami dan menghargai keberagaman, baik di dalam maupun di luar komunitas muslim. Inklusivitas tidak berarti mencampuradukkan ajaran agama, melainkan menghargai hak setiap orang untuk berkeyakinan dan beribadah sesuai agamanya.

5.1.2 Landasan Inklusivitas dalam Islam

Landasan utama inklusivitas dalam Islam terdapat dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13 yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Ayat ini menegaskan bahwa keragaman adalah desain Ilahi, dan tujuan

dari keragaman adalah agar manusia saling mengenal (li ta'ārafū), bukan saling bermusuhan.

Landasan lainnya adalah QS. Al-Baqarah [2]: 256 yang menegaskan tidak ada paksaan dalam beragama, serta QS. Al-Kafirun [109]: 6 yang menegaskan batas toleransi dalam beragama. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Islam menghargai kebebasan beragama dan menghormati keberagaman.

Dari Hadis, Nabi Muhammad SAW mencontohkan inklusivitas dalam Piagam Madinah, yang mengatur kehidupan bersama antara umat Islam, Yahudi, dan kelompok lain di Madinah. Piagam ini merupakan contoh awal dari masyarakat inklusif yang menghargai keragaman.

5.1.3 Inklusivitas sebagai Bagian dari Moderasi

Inklusivitas merupakan bagian tak terpisahkan dari moderasi beragama. Sikap moderat menuntut seseorang untuk tidak hanya menghargai perbedaan, tetapi juga melibatkan diri dalam kehidupan bersama dengan mereka yang berbeda. Inklusivitas menolak sikap eksklusif yang hanya mengakui kebenaran kelompok sendiri dan menutup diri dari kelompok lain.

Dalam konteks pendidikan Islam, inklusivitas berarti menciptakan lingkungan belajar yang terbuka bagi semua peserta didik, serta menanamkan sikap menghargai keragaman dalam diri mereka.

5.1.4 Prinsip-Prinsip Inklusivitas

Beberapa prinsip utama inklusivitas dalam pendidikan Islam antara lain sebagai berikut. Prinsip keterbukaan: menerima semua peserta didik tanpa diskriminasi. Prinsip penghargaan terhadap keragaman: menghargai perbedaan sebagai kekayaan, bukan ancaman. Prinsip keadilan: memberikan perlakuan yang adil kepada semua peserta didik. Prinsip partisipasi: melibatkan semua peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Prinsip kerja sama: membangun kerja sama lintas kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Dengan prinsip-prinsip ini, pendidikan Islam dapat menjadi wadah yang inklusif bagi semua peserta didik, tanpa terkecuali.

5.2 Desain Pembelajaran PAI Berbasis Nilai Inklusif

5.2.1 Prinsip Desain Pembelajaran Inklusif

Desain pembelajaran PAI berbasis nilai inklusif harus memperhatikan beberapa prinsip utama. Prinsip pertama adalah relevansi: materi pembelajaran harus relevan dengan kehidupan peserta didik yang beragam. Prinsip kedua adalah keterlibatan: semua peserta didik harus dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Prinsip ketiga adalah keberagaman sumber: sumber belajar harus mencerminkan keberagaman perspektif dan pengalaman. Prinsip keempat adalah penilaian yang adil: penilaian harus mempertimbangkan keberagaman latar belakang peserta didik.

5.2.2 Langkah-Langkah Penyusunan Desain Pembelajaran Inklusif

Penyusunan desain pembelajaran PAI berbasis nilai inklusif dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut. Pertama, analisis kebutuhan peserta didik, termasuk latar belakang agama, suku, dan kemampuan mereka. Kedua, perumusan tujuan pembelajaran yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta menekankan nilai inklusivitas. Ketiga, pemilihan materi pembelajaran yang mencerminkan keberagaman dan menghargai perbedaan. Keempat, pemilihan metode dan media pembelajaran yang mendukung partisipasi semua peserta didik. Kelima, penyusunan instrumen penilaian yang adil dan komprehensif. Keenam, evaluasi dan revisi desain pembelajaran berdasarkan umpan balik.

5.2.3 Contoh Desain Pembelajaran Inklusif

Sebagai contoh, dalam pembelajaran tentang toleransi beragama, guru dapat merancang pembelajaran yang melibatkan peserta didik dari berbagai latar belakang. Peserta didik diajak untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana mereka berinteraksi dengan pemeluk agama lain, kemudian mendiskusikan nilai-nilai toleransi yang dapat dipetik dari pengalaman tersebut.

Guru juga dapat mengundang narasumber dari luar, misalnya tokoh agama lain, untuk berdialog dengan peserta didik tentang pentingnya kerukunan umat beragama. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga dari pengalaman nyata.

5.2.4 Integrasi Nilai Inklusif dalam Seluruh Komponen Pembelajaran

Nilai inklusif harus diintegrasikan dalam seluruh komponen pembelajaran, mulai dari tujuan, materi, metode, media, hingga penilaian. Integrasi ini tidak boleh bersifat tambahan, melainkan harus menjadi ruh yang menjiwai seluruh proses pembelajaran. Dengan integrasi semacam ini, pembelajaran PAI tidak hanya mentransfer pengetahuan tentang inklusivitas, tetapi juga menanamkan sikap dan perilaku inklusif dalam diri peserta didik.

5.3 Metode dan Pendekatan Pembelajaran yang Mendukung Inklusivitas

5.3.1 Pendekatan Pembelajaran Aktif

Pendekatan pembelajaran aktif menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran, bukan objek. Mereka dilibatkan secara aktif dalam proses belajar, baik melalui diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, maupun proyek. Pendekatan ini sangat mendukung inklusivitas, karena memberi kesempatan kepada semua peserta didik untuk berpartisipasi dan berkontribusi.

5.3.2 Pendekatan Pembelajaran Kolaboratif

Pendekatan pembelajaran kolaboratif menekankan kerja sama antar peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Peserta didik belajar untuk saling membantu, saling menghargai, dan saling melengkapi. Pendekatan ini sangat efektif untuk menanamkan sikap inklusif, karena peserta didik terbiasa bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakang.

5.3.3 Pendekatan Pembelajaran Kontekstual

Pendekatan pembelajaran kontekstual menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi nyata dalam kehidupan peserta didik. Peserta didik diajak untuk memahami bagaimana nilai-nilai inklusif diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini membuat pembelajaran lebih bermakna dan membekas.

5.3.4 Metode Dialog dan Diskusi

Metode dialog dan diskusi memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertukar pikiran, mendengarkan pendapat orang lain, dan menghargai perbedaan. Metode ini sangat mendukung inklusivitas, karena melatih peserta didik untuk berkomunikasi secara santun dan terbuka.

5.3.5 Metode Proyek Kolaboratif

Metode proyek kolaboratif melibatkan peserta didik dalam mengerjakan proyek bersama, misalnya proyek sosial, penelitian, atau karya kreatif. Melalui metode ini, peserta didik belajar untuk bekerja sama, berbagi tugas, dan menghargai kontribusi setiap anggota kelompok.

5.3.6 Metode Studi Kasus

Metode studi kasus mengajak peserta didik untuk menganalisis situasi nyata yang berkaitan dengan inklusivitas, misalnya kasus intoleransi atau diskriminasi. Peserta didik diajak untuk mencari solusi dan merumuskan tindakan yang tepat. Metode

ini melatih peserta didik untuk berpikir kritis dan empatik. Dengan berbagai metode dan pendekatan ini, pembelajaran PAI dapat menjadi wahana yang efektif untuk menanamkan sikap inklusif pada peserta didik.

5.4 Peran Media dan Bahan Ajar dalam Menanamkan Sikap Inklusif

5.4.1 Kriteria Media dan Bahan Ajar Inklusif

Media dan bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran PAI harus memenuhi beberapa kriteria inklusif berikut. Media dan bahan ajar harus mencerminkan keberagaman, baik dari segi tokoh, latar, maupun perspektif. Media dan bahan ajar juga harus menghindari stereotip dan prasangka terhadap kelompok tertentu. Selain itu, media dan bahan ajar harus mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan empatik. Terakhir, media dan bahan ajar harus mudah diakses oleh semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

5.4.2 Jenis Media dan Bahan Ajar Inklusif

Beberapa jenis media dan bahan ajar yang dapat digunakan untuk menanamkan sikap inklusif antara lain sebagai berikut. Buku teks yang memuat kisah-kisah tentang keragaman dan toleransi. Video yang menampilkan kehidupan bersama dalam keragaman. Artikel dan berita tentang kerukunan umat beragama. Gambar dan infografis yang menggambarkan keberagaman. Media digital seperti aplikasi, website, dan media sosial yang menyebarkan pesan inklusivitas.

5.4.3 Pemanfaatan Media Digital

Di era digital, media digital memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk sikap peserta didik. Karena itu, guru PAI perlu memanfaatkan media digital untuk menanamkan sikap inklusif. Misalnya, guru dapat mengajak peserta didik untuk membuat konten digital yang menyebarkan pesan toleransi, atau mengikuti kampanye digital tentang kerukunan umat beragama.

Namun, guru juga perlu mengajarkan peserta didik untuk bersikap kritis terhadap media digital, karena tidak semua konten yang beredar mendukung nilai inklusivitas. Peserta didik harus diajarkan untuk memverifikasi informasi dan menghindari konten yang memicu kebencian.

5.4.4 Pengembangan Bahan Ajar oleh Guru

Guru PAI dapat mengembangkan bahan ajar sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai inklusivitas. Bahan ajar ini dapat berupa modul, lembar kerja, atau bahan presentasi yang dirancang khusus untuk menanamkan sikap inklusif.

Dalam mengembangkan bahan ajar, guru perlu memperhatikan karakteristik peserta didik, konteks lokal, serta nilai-nilai inklusivitas yang ingin ditanamkan. Bahan ajar yang dikembangkan sendiri akan lebih relevan dan bermakna bagi peserta didik.

5.5 Studi Kasus Implementasi Pembelajaran Inklusif di Sekolah/Madrasah

5.5.1 Studi Kasus 1: Pembelajaran Toleransi di Madrasah Aliyah

Sebuah madrasah aliyah di kota besar menghadapi tantangan berupa meningkatnya sikap intoleran di kalangan peserta didik, yang sebagian besar dipengaruhi oleh media sosial. Untuk mengatasi hal ini, madrasah tersebut merancang program pembelajaran inklusif yang melibatkan peserta didik dalam kegiatan lintas agama.

Program ini mencakup beberapa kegiatan berikut. Kunjungan ke tempat ibadah agama lain, seperti gereja, vihara, dan pura. Dialog dengan tokoh agama lain tentang pentingnya kerukunan. Bakti sosial bersama pemeluk agama lain di lingkungan sekitar. Serta pembuatan konten digital yang menyebarkan pesan toleransi.

Hasil dari program ini cukup menggembirakan. Peserta didik menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap perbedaan, dan mampu berkomunikasi secara santun dengan pemeluk agama lain. Program ini juga mendapat dukungan dari orang tua dan masyarakat.

5.5.2 Studi Kasus 2: Pembelajaran Inklusif di Sekolah Menengah Pertama

Sebuah SMP Islam di daerah pedesaan memiliki peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang suku dan budaya. Meskipun demikian, sekolah ini menghadapi tantangan berupa adanya kelompok peserta didik yang cenderung eksklusif dan menutup diri dari kelompok lain.

Untuk mengatasi hal ini, sekolah merancang pembelajaran PAI yang berbasis nilai inklusif. Guru PAI menggunakan metode pembelajaran kolaboratif, di mana peserta didik dari berbagai latar belakang

bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek. Guru juga mengajak peserta didik untuk berbagi cerita tentang budaya dan tradisi masing-masing.

Hasilnya, peserta didik menjadi lebih akrab satu sama lain, dan sikap eksklusif perlahan-lahan hilang. Mereka belajar untuk menghargai perbedaan dan bekerja sama dalam keragaman.

5.5.3 Studi Kasus 3: Pembelajaran Inklusif di Pesantren

Sebuah pesantren di Jawa Timur memiliki tradisi panjang dalam mengajarkan Islam yang moderat dan inklusif. Pesantren ini menerima santri dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang berasal dari keluarga dengan pemahaman keagamaan yang berbeda.

Pesantren ini menerapkan pembelajaran inklusif melalui beberapa cara berikut. Kajian kitab kuning yang menekankan nilai-nilai toleransi dan keseimbangan. Dialog antar santri tentang berbagai persoalan keagamaan. Kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat sekitar, termasuk pemeluk agama lain. Serta keteladanan kiai dan ustaz dalam bersikap moderat dan inklusif.

Hasilnya, santri pesantren ini dikenal memiliki sikap yang moderat, toleran, dan inklusif. Mereka mampu hidup berdampingan secara damai dengan masyarakat yang beragam.

5.5.4 Pelajaran dari Studi Kasus

Dari ketiga studi kasus di atas, dapat dipetik beberapa pelajaran berikut. Pertama, pembelajaran

inklusif memerlukan desain yang matang dan melibatkan berbagai pihak. Kedua, metode pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan kontekstual sangat efektif untuk menanamkan sikap inklusif. Ketiga, keteladanan guru dan pemimpin sekolah sangat menentukan keberhasilan pembelajaran inklusif. Keempat, kolaborasi dengan keluarga dan masyarakat sangat penting untuk memperkuat nilai inklusivitas. Kelima, pembelajaran inklusif harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya kegiatan sesaat.

Dengan menerapkan pelajaran-pelajaran ini, sekolah dan madrasah dapat mengembangkan pembelajaran PAI yang benar-benar menanamkan sikap inklusif pada peserta didik.

BAB VI

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM

6.1 Konsep Multikulturalisme dan Keberagaman dalam Islam

6.1.1 Pengertian Multikulturalisme

Multikulturalisme adalah pandangan yang mengakui, menghargai, dan merayakan keberagaman budaya, suku, agama, ras, dan bahasa dalam suatu masyarakat. Multikulturalisme bukan sekadar kenyataan tentang adanya keragaman, melainkan juga sikap dan kebijakan yang menjunjung tinggi keragaman tersebut sebagai kekayaan, bukan ancaman.

Dalam konteks pendidikan, multikulturalisme berarti pendekatan pendidikan yang mengakui dan menghargai keberagaman peserta didik, serta mempersiapkan mereka untuk hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk. Pendidikan multikultural bertujuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap perbedaan.

6.1.2 Keberagaman sebagai Sunnatullah

Dalam Islam, keberagaman dipandang sebagai sunnatullah, yakni ketetapan Allah yang tidak dapat dihindari. QS. Al-Hujurat [49]: 13 menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan, kemudian menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal (li ta'ārafū).

Selain itu, QS. Ar-Rum [30]: 22 menyatakan bahwa perbedaan bahasa dan warna kulit adalah tanda-tanda kebesaran Allah:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui."

Ayat ini menunjukkan bahwa keberagaman bukanlah sesuatu yang perlu dipertentangkan, melainkan sesuatu yang perlu disyukuri dan direnungkan sebagai tanda kebesaran Allah.

6.1.3 Keberagaman dalam Perspektif Sejarah Islam

Sejarah Islam menunjukkan bahwa keberagaman telah menjadi bagian dari kehidupan umat Islam sejak awal. Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Madinah yang majemuk, terdiri atas berbagai suku, agama, dan kelompok. Piagam Madinah merupakan konstitusi pertama yang mengatur kehidupan bersama dalam keragaman, menjamin hak setiap kelompok untuk menjalankan agamanya masing-masing.

Pada masa kejayaan Islam, peradaban Islam menjadi rumah bagi berbagai budaya, bahasa, dan tradisi. Kota-kota seperti Baghdad, Kordoba, dan Kairo menjadi pusat ilmu pengetahuan yang menampung para ilmuwan dari berbagai latar belakang agama dan budaya. Ini menunjukkan

bahwa Islam memiliki tradisi panjang dalam mengelola keberagaman secara damai dan produktif.

6.1.4 Urgensi Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural menjadi sangat urgen dalam konteks Indonesia yang majemuk. Indonesia terdiri atas ribuan suku, ratusan bahasa daerah, dan enam agama resmi yang diakui. Tanpa pendidikan multikultural, keragaman ini berpotensi menjadi sumber konflik dan perpecahan.

Pendidikan multikultural bertujuan untuk menanamkan sikap menghargai perbedaan, membangun kesadaran akan pentingnya keadilan dan kesetaraan, serta mempersiapkan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk. Dengan pendidikan multikultural, peserta didik akan tumbuh menjadi generasi yang toleran, inklusif, dan berkeadaban.

6.2 Prinsip Ta'aruf dan Ukhuwah sebagai Basis Pendidikan Multikultural

6.2.1 Prinsip Ta'aruf

Ta'aruf berasal dari akar kata Arab 'arafa yang berarti mengenal. Dalam istilah, ta'aruf berarti saling mengenal dan memahami satu sama lain. Prinsip ini termaktub dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13, yang menegaskan bahwa tujuan dari keberagaman adalah agar manusia saling mengenal.

Ta'aruf menuntut sikap terbuka untuk mempelajari budaya, tradisi, dan keyakinan orang lain, tanpa prasangka dan stereotype. Ia menolak sikap eksklusif yang menutup diri dari kelompok

lain, serta sikap merendahkan budaya atau keyakinan orang lain.

Dalam konteks pendidikan multikultural, ta'aruf menjadi basis untuk membangun pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman. Peserta didik diajak untuk mengenal dan memahami budaya, tradisi, dan keyakinan teman-teman mereka yang berbeda.

6.2.2 Prinsip Ukhuwah

Ukhuwah berasal dari akar kata Arab akhā yang berarti saudara. Dalam istilah, ukhuwah berarti persaudaraan atau persahabatan. Dalam Islam, ukhuwah memiliki beberapa dimensi, antara lain ukhuwah islamiyah (persaudaraan sesama muslim), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa), dan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia).

Ukhuwah basyariyah merupakan dasar penting bagi pendidikan multikultural. Prinsip ini menegaskan bahwa semua manusia adalah saudara, tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau budaya. Karena itu, setiap manusia berhak mendapatkan penghormatan dan perlakuan yang adil.

Dalam konteks pendidikan multikultural, ukhuwah menjadi basis untuk membangun solidaritas dan kerja sama lintas kelompok. Peserta didik diajak untuk memandang teman-teman mereka yang berbeda sebagai saudara, bukan sebagai orang asing atau ancaman.

6.2.3 Sinergi Ta'aruf dan Ukhuwah

Ta'aruf dan ukhuwah harus berjalan sinergis. Ta'aruf tanpa ukhuwah bisa berhenti pada pengetahuan tentang perbedaan, tanpa melahirkan solidaritas. Sebaliknya, ukhuwah tanpa ta'aruf bisa menjadi persaudaraan yang sempit, karena tidak dilandasi pemahaman yang mendalam tentang perbedaan.

Sinergi antara ta'aruf dan ukhuwah akan melahirkan pendidikan multikultural yang kokoh, yang tidak hanya mengajarkan pengetahuan tentang keberagaman, tetapi juga menanamkan sikap dan perilaku yang menghargai perbedaan.

6.2.4 Implikasi Ta'aruf dan Ukhuwah dalam Praktik Pendidikan

Prinsip ta'aruf dan ukhuwah memiliki implikasi konkret dalam praktik pendidikan. Guru perlu menciptakan suasana kelas yang terbuka dan aman bagi semua peserta didik untuk berbagi tentang latar belakang mereka. Guru juga perlu mendorong peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok yang beragam. Selain itu, guru perlu menjadi teladan dalam bersikap terbuka dan menghargai perbedaan. Terakhir, guru perlu mengajak peserta didik untuk terlibat dalam kegiatan sosial lintas kelompok, sehingga mereka dapat mengalami langsung keindahan keragaman.

6.3 Model Pendidikan Multikultural di Sekolah/Madrasah

6.3.1 Model Kontribusi

Model kontribusi adalah model pendidikan multikultural yang paling sederhana. Dalam model

ini, sekolah memasukkan kontribusi budaya-budaya tertentu ke dalam kurikulum, misalnya melalui perayaan hari besar budaya, penampilan seni tradisional, atau penyajian makanan khas daerah.

Model ini memiliki kelebihan, yaitu mudah dilaksanakan dan dapat meningkatkan kesadaran peserta didik tentang keberagaman. Namun, model ini juga memiliki kelemahan, yaitu hanya menyentuh permukaan, tanpa mengubah struktur kurikulum secara mendasar.

6.3.2 Model Aditif

Model aditif adalah model pendidikan multikultural yang menambahkan konten tentang keberagaman ke dalam kurikulum, tanpa mengubah struktur dasarnya. Misalnya, sekolah menambahkan bab tentang budaya-budaya tertentu dalam mata pelajaran sejarah, atau menambahkan kegiatan ekstrakurikuler tentang keragaman.

Model ini lebih mendalam daripada model kontribusi, tetapi masih belum mengubah cara pandang peserta didik secara mendasar.

6.3.3 Model Transformasi

Model transformasi adalah model pendidikan multikultural yang mengubah struktur kurikulum secara mendasar, sehingga keberagaman menjadi bagian integral dari seluruh mata pelajaran. Dalam model ini, peserta didik diajak untuk melihat persoalan dari berbagai perspektif, termasuk perspektif kelompok yang selama ini terpinggirkan.

Model ini lebih mendalam dan berpotensi mengubah cara pandang peserta didik secara

mendasar. Namun, model ini juga lebih menuntut komitmen dan kompetensi guru.

6.3.4 Model Aksi Sosial

Model aksi sosial adalah model pendidikan multikultural yang paling mendalam. Dalam model ini, peserta didik tidak hanya belajar tentang keberagaman, tetapi juga terlibat dalam aksi sosial untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan.

Model ini menuntut peserta didik untuk mengidentifikasi persoalan ketidakadilan di sekitar mereka, kemudian merancang dan melaksanakan aksi untuk mengatasinya. Model ini melatih peserta didik untuk menjadi agen perubahan yang aktif dan bertanggung jawab.

6.3.5 Pemilihan Model yang Tepat

Pemilihan model pendidikan multikultural harus disesuaikan dengan konteks sekolah, karakteristik peserta didik, dan tujuan yang ingin dicapai. Sekolah dapat memulai dari model yang paling sederhana, kemudian secara bertahap bergerak ke model yang lebih mendalam.

Yang terpenting adalah bahwa pendidikan multikultural tidak berhenti pada pengetahuan tentang keberagaman, tetapi benar-benar menanamkan sikap dan perilaku yang menghargai perbedaan, serta mendorong peserta didik untuk menjadi agen perubahan yang aktif.

6.4 Tantangan Implementasi Pendidikan

Multikultural di Indonesia

6.4.1 Tantangan Struktural

Tantangan struktural dalam implementasi pendidikan multikultural di Indonesia antara lain sebagai berikut. Kurikulum yang masih cenderung sentralistik dan seragam, sehingga kurang mengakomodasi keberagaman lokal. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga pendidik, sarana, maupun dana. Ketimpangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Serta kebijakan pendidikan yang belum sepenuhnya mendukung pendidikan multikultural.

6.4.2 Tantangan Kultural

Tantangan kultural dalam implementasi pendidikan multikultural antara lain sebagai berikut. Masih kuatnya prasangka dan stereotip terhadap kelompok tertentu. Adanya sikap eksklusif dan fanatik dalam sebagian masyarakat. Pengaruh budaya global yang dapat mengikis nilai-nilai lokal. Serta adanya kelompok yang menolak keberagaman atas nama agama atau budaya.

6.4.3 Tantangan Politis

Tantangan politis dalam implementasi pendidikan multikultural antara lain sebagai berikut. Politisasi identitas agama dan suku untuk kepentingan politik praktis. Adanya kepentingan kelompok tertentu yang ingin mempertahankan status quo. Serta lemahnya penegakan hukum terhadap tindak diskriminasi dan intoleransi.

6.4.4 Tantangan Teknologis

Tantangan teknologis dalam implementasi pendidikan multikultural antara lain sebagai

berikut. Penyebaran konten radikal dan ekstrem melalui media sosial. Adanya echo chamber yang membuat peserta didik hanya terpapar pada pandangan yang sama dengan mereka. Serta kesenjangan akses teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan.

6.4.5 Strategi Menghadapi Tantangan

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif, antara lain sebagai berikut. Pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel dan mengakomodasi keberagaman lokal. Peningkatan kompetensi guru dalam pendidikan multikultural. Penguatan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pemanfaatan media digital untuk menyebarkan pesan keberagaman. Serta penegakan hukum yang tegas terhadap tindak diskriminasi dan intoleransi.

Dengan strategi ini, pendidikan multikultural di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa yang toleran, inklusif, dan berkeadaban.

6.5 Peran Kearifan Lokal dalam Mendukung Pendidikan Multikultural

6.5.1 Pengertian Kearifan Lokal

Kearifan lokal (local wisdom) adalah nilai-nilai, pengetahuan, dan praktik yang berkembang dalam suatu masyarakat lokal, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal mencerminkan cara pandang, cara hidup, dan cara menyelesaikan persoalan yang khas dari suatu masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kearifan lokal sangat beragam,

sesuai dengan keberagaman suku dan budaya. Kearifan lokal dapat berupa nilai-nilai, tradisi, ungkapan, seni, atau praktik sosial yang mengandung kebijaksanaan.

6.5.2 Kearifan Lokal sebagai Sumber Nilai Multikultural

Kearifan lokal banyak yang mengandung nilai-nilai multikultural, seperti toleransi, kerja sama, gotong royong, dan penghormatan terhadap perbedaan. Misalnya, tradisi gotong royong di berbagai daerah Indonesia mencerminkan nilai kerja sama dan solidaritas. Tradisi selamatan atau kenduri mencerminkan nilai kebersamaan dan syukur. Tradisi halal bi halal mencerminkan nilai saling memaafkan dan mempererat persaudaraan.

Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan multikultural, sehingga kearifan lokal dapat menjadi sumber nilai yang memperkuat pendidikan multikultural.

6.5.3 Integrasi Kearifan Lokal dalam Pendidikan Multikultural

Integrasi kearifan lokal dalam pendidikan multikultural dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut. Memasukkan materi tentang kearifan lokal ke dalam kurikulum, baik sebagai mata pelajaran tersendiri maupun sebagai bagian dari mata pelajaran lain. Menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal, misalnya melalui studi kasus, proyek, atau kunjungan lapangan. Melibatkan tokoh masyarakat dan pemangku adat dalam proses pembelajaran. Serta

menyelenggarakan kegiatan yang menampilkan kearifan lokal, seperti festival budaya, lomba seni tradisional, atau pameran kerajinan.

6.5.4 Contoh Kearifan Lokal yang Mendukung Multikulturalisme

Beberapa contoh kearifan lokal Indonesia yang mendukung multikulturalisme antara lain sebagai berikut. Pela Gandong di Maluku, yaitu tradisi persaudaraan antar desa yang berbeda agama. Subak di Bali, yaitu sistem irigasi bersama yang mencerminkan kerja sama dan keadilan. Rembug Desa di Jawa, yaitu tradisi musyawarah untuk menyelesaikan persoalan bersama. Serta Lubuk Larangan di Sumatera, yaitu tradisi menjaga lingkungan bersama yang mencerminkan kebijaksanaan lokal.

Kearifan-kearifan lokal semacam ini dapat menjadi model bagi pendidikan multikultural, karena mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip moderasi beragama.

6.5.5 Tantangan Pelestarian Kearifan Lokal

Pelestarian kearifan lokal menghadapi berbagai tantangan, antara lain sebagai berikut. Arus globalisasi yang membawa nilai-nilai budaya asing yang dapat mengikis kearifan lokal. Modernisasi yang mengubah cara hidup masyarakat. Kurangnya perhatian terhadap pelestarian kearifan lokal. Serta komersialisasi budaya yang mengubah kearifan lokal menjadi komoditas.

Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya pelestarian kearifan lokal yang sistematis,

antara lain melalui pendidikan, penelitian, dokumentasi, dan pengembangan. Pendidikan multikultural dapat menjadi wahana penting untuk melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal.

BAB VII

DIALOG ANTARAGAMA DAN PENGUATAN KERUKUNAN

7.1 Konsep dan Landasan Dialog Antaragama dalam Islam

7.1.1 Pengertian Dialog Antaragama

Dialog antaragama adalah proses komunikasi dan interaksi yang dilakukan oleh pemeluk agama yang berbeda, dengan tujuan untuk saling memahami, saling menghormati, dan bekerja sama dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama. Dialog antaragama bukanlah upaya untuk mencampuradukkan ajaran agama, melainkan upaya untuk membangun jembatan komunikasi dan kerja sama di tengah perbedaan.

Dalam konteks pendidikan Islam, dialog antaragama merupakan bagian penting dari upaya menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Peserta didik perlu dilatih untuk berkomunikasi secara santun dan terbuka dengan pemeluk agama lain, sehingga mereka tumbuh menjadi generasi yang toleran, inklusif, dan berkeadaban.

7.1.2 Landasan Dialog Antaragama dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan landasan yang kuat bagi dialog antaragama. Beberapa ayat kunci yang

menjadi landasan dialog antaragama antara lain sebagai berikut.

QS. An-Nahl [16]: 125 menegaskan etika dakwah dan dialog:

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik."

Ayat ini memberikan tiga etika utama dalam dialog: hikmah (kebijaksanaan), mauizah hasanah (pengajaran yang baik), dan mujaadalah dengan cara yang terbaik. Ketiganya menjadi prinsip dasar dalam berdialog dengan pemeluk agama lain.

QS. Al-Ankabut [29]: 46 menegaskan etika dialog dengan Ahli Kitab:

"Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang baik."

Ayat ini menegaskan bahwa dialog dengan pemeluk agama lain harus dilakukan dengan cara yang baik dan santun, bukan dengan kekerasan atau paksaan.

QS. Ali Imran [3]: 64 mengajak kepada titik temu:

"Katakanlah, 'Wahai Ahli Kitab, marilah kita berpegang kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu.'"

Ayat ini menunjukkan bahwa dialog antaragama dapat dimulai dari titik-titik kesamaan yang dimiliki bersama, tanpa harus mengorbankan keyakinan masing-masing.

7.1.3 Etika Dialog Antaragama

Berdasarkan ayat-ayat di atas, dapat dirumuskan beberapa etika dialog antaragama dalam Islam.

Pertama, sikap hikmah (bijaksana). Setiap peserta dialog harus menyadari bahwa masing-masing meyakini agamanya sebagai yang benar, dan menghormati perbedaan cara pandang yang ada.

Kedua, penggunaan mauizah hasanah (pengajaran yang baik). Dialog harus dilakukan dengan kata-kata yang santun dan tepat, menghindari kata-kata yang menyakitkan atau menyinggung keyakinan orang lain.

Ketiga, musyawarah dengan cara terbaik. Jika terjadi perbedaan pendapat, dialog harus dilakukan dengan cara yang baik, bukan dengan debat kusir atau saling menjatuhkan.

Keempat, kesetaraan. Semua peserta dialog memiliki kedudukan yang setara, tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah.

Kelima, tujuan yang jelas. Dialog harus memiliki tujuan yang jelas, apakah untuk mencari kebenaran, membangun kerja sama, atau menyelesaikan konflik.

7.1.4 Tujuan Dialog Antaragama

Dialog antaragama memiliki beberapa tujuan utama. Tujuan pertama adalah saling mengenal (ta'aruf), sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13. Dialog memungkinkan pemeluk agama yang berbeda untuk saling mengenal dan memahami, sehingga mengurangi prasangka dan stereotip.

Tujuan kedua adalah membangun kerja sama dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama, seperti perdamaian, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Tujuan ketiga adalah menyelesaikan konflik yang mungkin timbul akibat

kesalahpahaman atau perbedaan kepentingan. Tujuan keempat adalah memperkuat kerukunan dan persatuan bangsa, sebagaimana menjadi cita-cita bersama seluruh warga negara Indonesia.

7.2 Model-Model Dialog Antaragama di Indonesia

7.2.1 Dialog Kehidupan Sehari-hari

Model dialog yang paling sederhana dan paling sering terjadi adalah dialog dalam kehidupan sehari-hari. Dialog ini terjadi secara alami ketika pemeluk agama yang berbeda berinteraksi dalam kegiatan sosial, ekonomi, atau budaya. Misalnya, ketika tetangga yang berbeda agama saling membantu dalam kerja bakti, atau ketika pedagang dari berbagai agama berinteraksi di pasar. Dialog kehidupan sehari-hari ini sangat penting karena menjadi fondasi bagi kerukunan. Di Indonesia, dialog semacam ini telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang majemuk.

7.2.2 Dialog Kelembagaan

Dialog kelembagaan adalah dialog yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan atau organisasi masyarakat. Dialog ini biasanya bersifat lebih formal dan terstruktur, dengan agenda dan tujuan yang jelas. Contoh dialog kelembagaan adalah dialog yang difasilitasi oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), atau dialog yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), dan lain-lain. Dialog kelembagaan ini penting karena dapat

menghasilkan kesepakatan dan kerja sama yang lebih konkret antar lembaga keagamaan.

7.2.3 Dialog Akademik

Dialog akademik adalah dialog yang dilakukan di lingkungan akademik, seperti universitas dan lembaga penelitian. Dialog ini biasanya bersifat lebih mendalam dan teoretis, dengan fokus pada kajian-kajian keagamaan dan sosial. Dialog akademik ini penting karena dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran agama masing-masing, serta menemukan titik-titik temu yang dapat menjadi dasar kerja sama.

7.2.4 Dialog dalam Pendidikan

Dialog dalam pendidikan adalah dialog yang dilakukan di lingkungan sekolah dan madrasah. Dialog ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan sejak dini kepada peserta didik. Model dialog dalam pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain melalui pembelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, kunjungan ke tempat ibadah agama lain, atau proyek sosial bersama.

7.2.5 Dialog Digital

Dialog digital adalah dialog yang dilakukan melalui media sosial dan platform digital. Di era digital, dialog semacam ini semakin penting karena media sosial telah menjadi ruang interaksi utama bagi banyak orang, terutama generasi muda. Namun, dialog digital juga memiliki tantangan tersendiri, seperti echo chamber dan epistemic bubble yang

dapat memperkuat prasangka dan stereotip. Karena itu, dialog digital harus dilakukan dengan bijak dan kritis.

7.3 Peran Pendidikan dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama

7.3.1 Pendidikan sebagai Fondasi Kerukunan

Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun kerukunan umat beragama. Melalui pendidikan, nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan moderasi dapat ditanamkan sejak dini kepada peserta didik. Pendidikan juga dapat menjadi ruang pertemuan bagi peserta didik dari berbagai latar belakang agama dan budaya.

Menteri Agama RI menegaskan bahwa pendidikan lintas iman merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan sosial (social trust) di tengah masyarakat majemuk. "Kepercayaan sosial adalah fondasi dari masyarakat yang damai. Pendidikan lintas iman bukan hanya untuk mengetahui perbedaan, tetapi untuk memahami kemanusiaan," ujarnya.

7.3.2 Kurikulum Berbasis Cinta

Salah satu inovasi dalam pendidikan kerukunan adalah Kurikulum Berbasis Cinta yang diperkenalkan oleh Kementerian Agama. Kurikulum ini menekankan pentingnya empati, belas kasih, dan rasa hormat terhadap sesama manusia.

Menurut Menteri Agama, Kurikulum Berbasis Cinta bukan sekadar teori, melainkan praktik sehari-hari. "Untuk benar-benar mencintai Tuhan, seharusnya juga mencintai manusia. Perbedaan

keyakinan bukan alasan untuk takut, tetapi peluang untuk saling belajar," jelasnya.

7.3.3 Pendidikan Lintas Iman di Sekolah

Pendidikan lintas iman dapat diimplementasikan di sekolah melalui berbagai cara, antara lain sebagai berikut. Menyelenggarakan dialog antaragama yang melibatkan peserta didik dari berbagai latar belakang. Mengadakan kegiatan sosial bersama yang melibatkan pemeluk agama yang berbeda. Mengunjungi tempat ibadah agama lain untuk memperkenalkan keragaman. Serta mengembangkan modul pembelajaran yang berbasis konteks sosial-budaya setempat.

Penelitian menunjukkan bahwa implementasi dialog lintas iman di sekolah dapat dilakukan melalui kolaborasi antaragama dalam bentuk proyek sosial bersama, perayaan hari besar keagamaan yang inklusif, dan forum diskusi lintas iman.

7.3.4 Peran Guru dalam Pendidikan Kerukunan

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan kerukunan. Guru tidak hanya menyampaikan materi tentang toleransi, tetapi juga harus menjadi teladan dalam bersikap moderat dan inklusif. Guru perlu menciptakan suasana kelas yang terbuka dan aman bagi semua peserta didik untuk berbagi tentang latar belakang mereka.

Guru juga perlu dilatih untuk memiliki wawasan pluralisme, kemampuan reflektif, serta kompetensi interdisipliner yang memungkinkan mereka mengaitkan ajaran agama dengan realitas sosial.

7.3.5 Tantangan Pendidikan Kerukunan

Pendidikan kerukunan menghadapi berbagai tantangan, antara lain sebagai berikut. Kurikulum pendidikan agama yang masih terlalu normatif dan tekstual. Kualitas dan kompetensi guru yang masih bervariasi. Kebijakan pendidikan yang belum sepenuhnya mendukung integrasi nilai-nilai multikulturalisme. Serta pengaruh media sosial yang dapat memperkuat prasangka dan stereotip.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, guru, orang tua, dan masyarakat.

7.4 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendidikan

7.4.1 Pengertian dan Tugas FKUB

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah wadah yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi pemerintah untuk membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama demi tercapainya kerukunan dan kesejahteraan di Indonesia.

FKUB memiliki beberapa tugas utama, antara lain sebagai berikut. Melakukan dialog dengan tokoh agama tingkat kabupaten/kota. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pimpinan daerah. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait kerukunan umat beragama. Serta memberikan rekomendasi terkait pendirian rumah ibadah.

7.4.2 Peran FKUB dalam Pendidikan

FKUB memiliki peran yang signifikan dalam dunia pendidikan, terutama dalam upaya menanamkan nilai-nilai moderasi beragama dan kerukunan sejak dini.

Salah satu contohnya adalah FKUB Kota Makassar yang menjajaki kerja sama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar. Kerja sama ini bertujuan agar edukasi moderasi beragama tidak hanya melibatkan perwakilan siswa, melainkan dilaksanakan langsung di sekolah-sekolah, khususnya jenjang pendidikan dasar dan menengah. "Kami berharap program ini dapat mulai berjalan tahun ini. Meski interaksi di tingkat elit sudah baik, persoalan di tingkat akar rumput masih membutuhkan perhatian serius," kata Ketua FKUB Kota Makassar.

7.4.3 Program FKUB untuk Pelajar

FKUB juga aktif menyelenggarakan program-program yang menjangkau pelajar. Misalnya, FKUB DKI Jakarta menggelar Dialog Lintas Agama dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan bagi 60 pelajar SMA se-DKI Jakarta dari enam agama yang berbeda. Kegiatan ini bertujuan agar pelajar menjadi agen-agen kerukunan di sekolahnya masing-masing. Program-program semacam ini penting untuk membekali generasi muda dengan pemahaman tentang kerukunan dan toleransi, sehingga mereka dapat menjadi pelopor perdamaian di lingkungannya.

7.4.4 Rumah Moderasi sebagai Inisiatif FKUB

Beberapa FKUB juga mengembangkan inisiatif "Rumah Moderasi" sebagai ruang fasilitasi bagi kader dan SDM moderasi. Rumah Moderasi ini menjadi pusat kegiatan untuk penguatan nilai toleransi di tingkat lokal.

Di Kota Probolinggo, misalnya, FKUB mendorong pembentukan Rumah Moderasi yang akan menjadi ruang fasilitasi bagi kader dan SDM moderasi. "Rumah Moderasi akan menjadi ruang fasilitasi bagi kader dan SDM moderasi, yang kemudian akan terlibat langsung dalam penguatan nilai toleransi di kampung-kampung," jelas Ketua FKUB Kota Probolinggo.

7.4.5 Tantangan FKUB

FKUB menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan perannya, antara lain sebagai berikut. Keterbatasan sumber daya institusional. Legitimasi lokal yang tidak merata. Serta kesulitan menjangkau komunitas yang kurang melek digital.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan strategi komunikasi digital yang adaptif dan kolaborasi yang lebih kuat antara FKUB, lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas keagamaan.

7.5 Tantangan dan Strategi Penguatan Dialog Antaragama

7.5.1 Tantangan Dialog Antaragama

Dialog antaragama di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan-tantangan tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, intoleransi dan diskriminasi yang masih

terjadi di berbagai daerah. Kasus-kasus penolakan rumah ibadah, diskriminasi dalam layanan publik, dan ujaran kebencian di media sosial masih menjadi persoalan serius.

Kedua, polarisasi politik yang sering kali membawa isu agama ke dalam kontestasi politik. Hal ini dapat memperkeruh hubungan antaragama dan memicu ketegangan sosial.

Ketiga, misinformasi dan hoaks yang beredar di media sosial, terutama yang berkaitan dengan isu agama. Hoaks semacam ini dapat memicu prasangka dan kebencian antaragama.

Keempat, echo chamber dan epistemic bubble yang membuat seseorang hanya terpapar pada pandangan yang sama dengan dirinya, sehingga memperkuat stereotip dan prasangka terhadap kelompok lain.

Kelima, kurikulum pendidikan agama yang masih terlalu normatif dan tekstual, sehingga kurang mengembangkan sikap kritis dan kemampuan dialog peserta didik.

7.5.2 Strategi Penguatan Dialog Antaragama

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut.

Pertama, penguatan pendidikan lintas iman di sekolah dan madrasah. Pendidikan lintas iman harus dimulai sejak dini dan melibatkan semua peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama. Pendidikan ini harus menekankan pada pemahaman

kemanusiaan dan empati, bukan hanya pengetahuan tentang perbedaan.

Kedua, pengembangan kurikulum yang kontekstual. Kurikulum pendidikan agama perlu dikembangkan agar lebih kontekstual dan relevan dengan realitas sosial. Kurikulum harus mendorong peserta didik untuk merefleksikan ajaran agamanya dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang plural.

Ketiga, peningkatan kompetensi guru. Guru perlu dilatih untuk memiliki wawasan pluralisme, kemampuan reflektif, serta kompetensi interdisipliner yang memungkinkan mereka mengaitkan ajaran agama dengan realitas sosial.

Keempat, pemanfaatan media digital secara bijak. Media digital harus dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan-pesan toleransi dan perdamaian, bukan untuk menyebarkan kebencian dan hoaks. Literasi digital perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat bersikap kritis terhadap informasi yang diterima.

Kelima, penguatan peran FKUB. FKUB perlu diperkuat perannya, baik dari segi sumber daya maupun legitimasi, sehingga dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif. FKUB juga perlu mengembangkan strategi komunikasi digital yang adaptif untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Keenam, kolaborasi lintas sektor. Dialog antaragama memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, masyarakat sipil, dan media. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan ekosistem

yang mendukung terwujudnya kerukunan umat beragama.

7.5.3 Peran Generasi Muda

Generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat dialog antaragama dan kerukunan. Mereka adalah penerus bangsa yang akan menentukan arah masa depan Indonesia. Karena itu, generasi muda perlu dibekali dengan nilai-nilai moderasi beragama, toleransi, dan kemampuan berdialog secara santun.

Generasi muda juga perlu memanfaatkan media digital secara bijak untuk menyebarkan pesan-pesan perdamaian dan toleransi. Mereka dapat menjadi agen-agen kerukunan di lingkungannya masing-masing, baik di sekolah, kampus, maupun masyarakat.

BAB VIII

LITERASI DIGITAL DAN MODERASI BERAGAMA

8.1 Literasi Digital dalam Konteks Keberagamaan

8.1.1 Pengertian Literasi Digital Keagamaan

Literasi digital dalam konteks keberagamaan dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memproduksi informasi keagamaan secara kritis, etis, dan bertanggung jawab melalui media digital. Literasi ini tidak hanya mencakup keterampilan teknis menggunakan perangkat digital, tetapi juga kemampuan berpikir kritis terhadap konten keagamaan yang diterima, serta kesadaran akan tanggung jawab moral dalam berinteraksi di ruang digital.

Dalam kerangka moderasi beragama, literasi digital keagamaan menjadi kompetensi yang sangat penting. Peserta didik yang memiliki literasi digital keagamaan yang baik akan mampu memilah informasi keagamaan yang valid dari yang tidak valid, memahami konteks suatu dalil sebelum mengambil kesimpulan, serta menghindari sikap mudah menyalahkan pandangan yang berbeda.

8.1.2 Urgensi Literasi Digital Keagamaan

Urgensi literasi digital keagamaan semakin meningkat seiring dengan perubahan pola belajar

agama di kalangan generasi muda. Survei terkini menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen populasi Indonesia kini didominasi oleh generasi muda milenial, generasi Z, dan generasi alpha yang sebagian besar memperoleh pemahaman keagamaan dari ruang digital, bukan dari lembaga otoritatif seperti pesantren atau majelis taklim.

Fenomena ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, akses terhadap informasi keagamaan menjadi lebih mudah dan luas. Di sisi lain, tanpa literasi digital yang memadai, generasi muda rentan terpapar konten keagamaan yang dangkal, provokatif, atau bahkan radikal. Ketua Bidang Dakwah MUI Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, menyoroti bahwa konten video pendek berdurasi satu atau dua menit biasanya hanya menyampaikan sebagian kecil dari sebuah persoalan, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman karena tidak memberikan penjelasan secara utuh.

8.1.3 Dimensi-Dimensi Literasi Digital Keagamaan

Literasi digital keagamaan mencakup beberapa dimensi utama. Dimensi pertama adalah kemampuan teknis, yakni keterampilan menggunakan perangkat dan platform digital untuk mengakses informasi keagamaan. Dimensi kedua adalah kemampuan kognitif, yakni kemampuan mengevaluasi kredibilitas sumber, memahami konteks dalil, dan membedakan antara pendapat yang bersifat pasti (qat'i) dan yang masih terbuka penafsiran (zanni). Dimensi ketiga adalah

kemampuan afektif, yakni sikap kritis, reflektif, dan terbuka terhadap perbedaan pandangan. Dimensi keempat adalah kemampuan etis, yakni kesadaran akan tanggung jawab moral dalam memproduksi dan menyebarkan konten keagamaan.

Dengan keempat dimensi ini, literasi digital keagamaan tidak hanya membekali peserta didik dengan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk karakter keberagaman yang moderat, kritis, dan bertanggung jawab.

8.2 Dampak Media Sosial terhadap Pemahaman Keagamaan Generasi Muda

8.2.1 Transformasi Pola Belajar Agama

Media sosial telah mentransformasi cara generasi muda mempelajari agama secara mendasar. Jika dahulu rujukan agama identik dengan pesantren, ulama, atau lembaga pendidikan formal, kini popularitas media sosial sering kali menjadi tolok ukur baru. Seorang dai yang memiliki jutaan pengikut di media sosial bisa jadi lebih berpengaruh daripada ulama yang telah puluhan tahun mengaji, hanya karena ia lebih aktif di dunia digital.

Fenomena ini oleh sebagian pengamat disebut sebagai *algorithmic religion* — agama yang dibentuk oleh algoritma. Algoritma media sosial menentukan apa yang muncul di beranda pengguna, dan apa yang muncul itulah yang membentuk cara pandang keagamaan mereka. Jika algoritma terus-menerus menampilkan konten dari satu kelompok tertentu, maka cara pandang pengguna pun akan terbentuk oleh kelompok tersebut. Ia tidak akan terpapar pada pandangan yang berbeda, karena algoritma memang

dirancang untuk menyajikan konten yang sesuai dengan preferensinya.

Seorang tokoh agama mengungkapkan bahwa anak muda sekarang belajar agama bukan lagi dari ustaz atau lembaga keagamaan resmi, tetapi dari algoritma. Mereka bertanya ke mesin pencarian atau media sosial, dan orientasi keagamaan mereka terbentuk oleh apa yang muncul di algoritma. Ini adalah perubahan yang sangat mendasar, dan ia menuntut respons yang serius dari dunia pendidikan Islam.

8.2.2 Dampak Positif Media Sosial

Media sosial memiliki dampak positif dalam penyebaran pesan keagamaan yang moderat. Penelitian menunjukkan bahwa pesan keagamaan yang positif, kemampuan berpikir kritis, serta keteladanan figur agama dan publik berperan penting dalam memperkuat perspektif keagamaan yang moderat dan meningkatkan keterbukaan antariman. Media sosial juga dapat menjadi ruang interaksi lintas iman yang memungkinkan pertemuan berbagai perspektif, sehingga generasi muda dapat belajar memahami perbedaan secara lebih baik.

8.2.3 Dampak Negatif Media Sosial

Namun, media sosial juga menghadirkan dampak negatif yang signifikan. Tantangan-tantangan tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, kedangkalan pemahaman keagamaan. Konten video pendek yang hanya menyampaikan sebagian kecil dari suatu persoalan dapat menimbulkan

kesalahpahaman dan sikap mudah menyalahkan pandangan yang berbeda. Kedua, dominasi kelompok radikal di ruang digital. Penelitian menunjukkan bahwa media sosial masih largely didominasi oleh kelompok radikal, sementara kehadiran kelompok moderat dalam mengelola media sosial masih relatif terbatas. Ketiga, echo chamber dan epistemic bubble. Algoritma media sosial cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, sehingga seseorang hanya terpapar pada pandangan yang sama dengan dirinya. Hal ini dapat memperkuat prasangka dan stereotip terhadap kelompok lain. Keempat, misinformasi dan hoaks keagamaan. Penyebaran informasi keagamaan yang tidak valid, potongan dalil tanpa konteks, serta ujaran kebencian menjadi persoalan serius di ruang digital.

8.2.4 Pergeseran Otoritas Keagamaan

Salah satu dampak paling mendasar dari media sosial adalah pergeseran otoritas keagamaan. Jika dahulu otoritas keagamaan terletak pada ulama dan lembaga keagamaan yang memiliki sanad keilmuan yang jelas, kini otoritas tersebut mulai bergeser ke tokoh-tokoh atau konten yang direkomendasikan algoritma. Prof. Abustani mengingatkan pentingnya belajar agama kepada guru atau ulama yang memiliki sanad keilmuan yang jelas, karena identitas dan kapasitas penyampai materi di media sosial sering kali tidak diketahui.

Pergeseran ini menuntut respons yang bijak dari lembaga pendidikan Islam. Pendidikan Agama Islam harus mampu membekali peserta didik dengan

kemampuan untuk menilai kredibilitas sumber keagamaan, serta kesadaran akan pentingnya merujuk pada otoritas keilmuan yang mumpuni.

8.3 Strategi Penguatan Literasi Digital Berbasis Moderasi Beragama

8.3.1 Integrasi dalam Pembelajaran PAI

Strategi utama dalam penguatan literasi digital berbasis moderasi beragama adalah integrasi kedua dimensi ini dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Integrasi ini tidak berarti menambah mata pelajaran baru, melainkan menanamkan nilai-nilai literasi digital dan moderasi dalam seluruh proses pembelajaran.

Guru PAI dapat mengintegrasikan literasi digital dan moderasi beragama melalui beberapa cara. Pertama, memilih sumber digital yang kredibel untuk dijadikan bahan pembelajaran. Kedua, membiasakan peserta didik untuk melakukan tabayyun digital, yakni memverifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Ketiga, mengintegrasikan nilai moderasi beragama dalam materi PAI, misalnya dengan mengaitkan ayat-ayat tentang toleransi dengan fenomena media sosial. Keempat, mengadakan diskusi tentang kasus-kasus keagamaan aktual yang muncul di media sosial, sehingga peserta didik belajar menganalisisnya secara kritis. Kelima, membina etika digital Islami, sehingga peserta didik memahami tanggung jawab moral dalam berinteraksi di ruang digital.

Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital dan moderasi beragama dapat

dilakukan melalui tiga tahap: perencanaan pembelajaran yang mengandung muatan moderasi beragama, pelaksanaan pembelajaran dengan menyisipkan konten moderasi beragama yang kontekstual, serta evaluasi yang mengukur tingkat literasi digital dan moderasi beragama. Pendekatan bertahap ini memastikan bahwa integrasi tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan secara sistematis dan berkelanjutan.

8.3.2 Pengembangan Kurikulum Berbasis Literasi Digital

Pengembangan kurikulum berbasis literasi digital dan moderasi beragama menjadi strategi penting dalam menghadapi tantangan era Society 5.0. Kurikulum perlu dirancang untuk mengembangkan kompetensi ganda pada peserta didik: kemampuan mengevaluasi kredibilitas epistemik informasi sekaligus menunjukkan toleransi, pengendalian diri, dan tanggung jawab etis.

Implementasi strategis dapat dilakukan melalui reformulasi kurikulum berbasis literasi digital, penguatan kompetensi pedagogik digital guru, dan pengembangan sumber belajar kontekstual yang relevan dengan dinamika media sosial.

8.3.3 Peningkatan Kompetensi Guru

Guru PAI berperan sebagai pendidik, fasilitator, kurator informasi, dan pembimbing sikap keberagamaan peserta didik di ruang digital. Karena itu, peningkatan kompetensi guru dalam literasi

digital dan moderasi beragama menjadi prasyarat keberhasilan.

Guru perlu dilatih tidak hanya untuk mengoperasikan platform digital, tetapi juga untuk merancang aktivitas pembelajaran yang menghubungkan kompetensi teknologi dengan penalaran keagamaan dan pertimbangan etis. Kompetensi ini mencakup kemampuan memilih sumber digital yang kredibel, memoderasi diskusi online, mengidentifikasi misinformasi dan intoleransi, serta merancang penilaian reflektif.

8.3.4 Pemanfaatan E-Learning

Penerapan e-learning dalam pembelajaran PAI dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan literasi digital dan moderasi beragama. Penelitian menunjukkan bahwa e-learning dapat meningkatkan kemampuan teknologi dan kemandirian belajar, akses informasi keagamaan yang beragam, serta pemanfaatan media digital untuk penguatan nilai moderasi.

Namun, tantangan utama dalam penerapan e-learning adalah keterbatasan keterampilan digital guru dalam mengintegrasikan nilai Islam dengan teknologi, serta minimnya konten keagamaan digital yang tidak semuanya bersifat moderat. Karena itu, pengembangan konten digital yang moderat dan peningkatan kompetensi digital guru menjadi prioritas.

8.3.5 Pengembangan Ekosistem PAI Digital

Pengembangan ekosistem PAI yang menghubungkan praktik kelas dengan pengalaman

digital peserta didik menjadi strategi jangka panjang yang penting. Sekolah dapat mengintegrasikan inkuiri kolaboratif, pembelajaran berbasis masalah, dialog reflektif, dan produksi konten digital sehingga peserta didik tidak hanya mengonsumsi informasi keagamaan, tetapi juga belajar memproduksi respons yang bertanggung jawab terhadapnya.

8.4 Peran Konten Dakwah Digital yang Moderat

8.4.1 Tantangan Dakwah Digital Moderat

Dakwah digital moderat menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan-tantangan tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, dominasi kelompok radikal di ruang digital. Media sosial masih largely didominasi oleh kelompok radikal, sementara kehadiran kelompok moderat dalam mengelola media sosial masih relatif terbatas. Kedua, jumlah pengikut dai radikal yang lebih besar. Fakta bahwa dai radikal memiliki pengikut yang lebih banyak daripada dai moderat menjadi tantangan tersendiri dalam upaya menyebarkan pesan moderasi. Ketiga, masalah internal dai. Para dai juga menghadapi masalah internal seperti gejala psikologis, nafsu yang tidak terkendali, dan kompetisi yang tidak sehat, yang dapat berdampak negatif pada aktivitas dakwah. Keempat, kurangnya kontrol media oleh kelompok moderat. Kelompok moderat masih kurang dalam mengelola media sosial, sehingga konten-konten moderat kurang terlihat di ruang digital.

8.4.2 Etika Dakwah Digital Moderat

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, dakwah digital moderat memerlukan penerapan etika tertentu. Penelitian merumuskan beberapa etika utama dakwah digital moderat. Pertama, keikhlasan dan kejujuran. Dai harus menjalankan tugas dakwahnya dengan niat yang ikhlas, semata-mata mencari keridhaan Allah SWT, tanpa mengharapkan imbalan. Kedua, kesabaran. Dai harus memiliki kesabaran dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti cemoohan, hinaan, bahkan penolakan. Ketiga, penggunaan bahasa yang santun. Dai harus berhati-hati dalam memilih kata untuk menghindari kesalahan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum atau pelanggaran etika komunikasi. Keempat, menghindari debat yang tidak produktif. Dakwah harus difokuskan pada penyampaian pesan yang membangun, bukan pada perdebatan yang tidak membawa manfaat.

8.4.3 Karakteristik Dai Moderat di Era Digital

Dai moderat di era digital idealnya memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, kontekstual. Dai harus mampu menyesuaikan pesan dakwah dengan konteks audiens dan platform digital yang digunakan. Kedua, toleran. Dai harus menunjukkan sikap toleran terhadap perbedaan pandangan dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Ketiga, menghargai tradisi. Dai harus menghargai tradisi dan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Keempat, progresif. Dai harus memiliki sikap terbuka dan berpandangan ke depan dalam merespons perubahan zaman. Kelima, berpikiran luas. Dai harus memiliki pengetahuan keagamaan

yang luas untuk merespons berbagai tantangan dakwah di media sosial.

8.4.4 Strategi Konten Dakwah Moderat

Dalam memproduksi konten dakwah digital yang moderat, dai perlu memperhatikan beberapa strategi. Pertama, menyajikan pesan yang utuh dan kontekstual. Konten dakwah tidak boleh hanya menyampaikan potongan dalil tanpa konteks, karena hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman. Kedua, menggunakan pendekatan bil hikmah, mau'izhah hasanah, dan mujaadalah bi al-lati hiya ahsan. Ketiga pendekatan ini telah terbukti relevan dalam menciptakan dakwah yang damai, inklusif, dan kontekstual. Ketiga, menghindari konten provokatif. Konten dakwah harus menjauhi ujaran kebencian, provokasi, dan narasi yang memecah belah. Keempat, memproduksi konten positif secara konsisten. Kelompok moderat perlu secara aktif memproduksi konten positif untuk mengimbangi dominasi konten radikal di ruang digital.

8.4.5 Contoh Praktik Baik

Beberapa praktik baik dalam dakwah digital moderat dapat menjadi inspirasi. Universitas Negeri Malang, misalnya, menyelenggarakan pelatihan pembuatan konten moderasi beragama berbasis deep learning bagi siswa dan guru. Pelatihan ini bertujuan memperkuat literasi digital, toleransi, serta ketahanan siswa terhadap narasi ekstrem dan informasi yang mengganggu harmoni kebangsaan. Peserta tidak hanya diajak memahami keberagaman, melainkan juga mampu menerjemahkan nilai

toleransi menjadi karya positif yang dapat disebarluaskan di media sosial.

Program ini menargetkan pelatihan bagi 100 guru dan 100 siswa terpilih, produksi minimal 100 konten digital moderasi beragama, pembentukan 10 kelompok kerja lintas agama, serta tiga kampanye media sosial berskala regional. Praktik baik semacam ini dapat direplikasi di sekolah dan madrasah lain untuk memperkuat ekosistem digital yang moderat.

8.5 Pendidikan Media dan Kecakapan Berpikir Kritis Siswa

8.5.1 Pentingnya Pendidikan Media

Pendidikan media (media literacy education) adalah proses pembelajaran yang bertujuan membekali peserta didik dengan kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan memproduksi pesan media secara kritis. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidikan media menjadi sangat penting karena peserta didik tidak hanya berhadapan dengan media umum, tetapi juga dengan konten keagamaan yang beragam di ruang digital.

Penelitian menunjukkan bahwa integrasi literasi media kritis dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan keterampilan literasi peserta didik. Namun, penelitian juga mengungkapkan bahwa peserta didik Indonesia masih memerlukan lebih banyak latihan dalam membentuk penilaian yang bulat dan beralasan.

8.5.2 Kecakapan Berpikir Kritis dalam Konteks Keagamaan

Kecakapan berpikir kritis dalam konteks keagamaan mencakup beberapa kemampuan utama. Pertama, kemampuan menganalisis. Peserta didik harus mampu menganalisis konten keagamaan yang diterima, mengidentifikasi sumbernya, memahami konteksnya, dan menilai validitasnya. Kedua, kemampuan mengevaluasi. Peserta didik harus mampu mengevaluasi kredibilitas sumber, membedakan antara pendapat yang bersifat pasti (qat'i) dan yang masih terbuka penafsiran (zanni), serta mengenali bias dan prasangka dalam konten keagamaan. Ketiga, kemampuan merefleksikan. Peserta didik harus mampu merefleksikan dampak dari informasi keagamaan yang diterima terhadap pemahaman dan sikap keberagaman mereka. Keempat, kemampuan memproduksi. Peserta didik harus mampu memproduksi konten keagamaan yang bertanggung jawab, etis, dan moderat.

8.5.3 Strategi Pembelajaran Berpikir Kritis

Beberapa strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan kecakapan berpikir kritis peserta didik dalam konteks literasi digital dan moderasi beragama antara lain sebagai berikut.

Pertama, analisis kasus. Peserta didik diajak menganalisis kasus-kasus keagamaan aktual yang muncul di media sosial, kemudian mendiskusikan bagaimana kasus tersebut seharusnya dipahami secara kontekstual dan moderat. Kedua, diskusi terarah. Guru memandu diskusi dengan pertanyaan-

pertanyaan yang merangsang berpikir kritis, misalnya tentang pesan, sumber, konteks, dan nilai yang dapat dipelajari dari suatu konten. Guru perlu menegaskan batas diskusi agar kelas menjadi ruang aman untuk belajar mengelola perbedaan. Ketiga, produksi konten. Peserta didik diajak memproduksi konten digital yang menyebarkan pesan moderasi, sehingga mereka tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga kreator digital yang bertanggung jawab. Keempat, refleksi diri. Peserta didik diajak melakukan audit sederhana terhadap perilaku digitalnya, merefleksikan jenis konten yang sering dilihat, komentar yang pernah ditulis, serta informasi yang pernah dibagikan.

8.5.4 Pembinaan Etika Digital Islami

Pendidikan media dan berpikir kritis harus disertai dengan pembinaan etika digital Islami. Guru PAI dapat mengarahkan peserta didik untuk menjaga adab dalam berkomentar, tidak menyebarkan aib orang lain, tidak melakukan perundungan digital, tidak membagikan konten provokatif, serta menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan.

Etika digital Islami dikaitkan dengan konsep akhlak. Guru menjelaskan bahwa perilaku di ruang digital tetap memiliki konsekuensi moral dan keagamaan. Larangan ghibah (menggunjing) dikaitkan dengan perilaku menyebarkan aib di media sosial, larangan fitnah dikaitkan dengan penyebaran berita bohong, serta perintah berkata baik dikaitkan dengan etika berkomentar.

8.5.5 Penguatan Karakter dan Kewarganegaraan Digital

Pendidikan media dan berpikir kritis pada akhirnya bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memiliki karakter moderat dan menjadi warga digital yang bertanggung jawab. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi moderasi beragama dan literasi digital dapat memperkuat kompetensi kewarganegaraan sosial dan digital peserta didik.

Melalui pendekatan ini, PAI tidak hanya berfungsi sebagai transmisi ajaran, tetapi juga sebagai ruang untuk membentuk karakter keagamaan yang moderat, reflektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. PAI memegang posisi strategis sebagai benteng epistemik dan moral dalam menghadapi tantangan Society 5.0 secara konstruktif dan transformatif.

BAB IX

TANTANGAN EKSTREMISME DAN RADIKALISME DI ERA DIGITAL

9.1 Konsep dan Ciri-Ciri Ekstremisme serta Radikalisme Beragama

9.1.1 Memahami Akar Kata dan Makna Dasarnya

Ketika kita berbicara tentang ekstremisme dan radikalisme, kita sering menggunakannya secara bergantian, seolah-olah keduanya adalah hal yang sama. Padahal, meskipun memiliki keterkaitan, keduanya memiliki nuansa makna yang berbeda. Memahami perbedaan ini penting, karena pencegahan yang tepat memerlukan pemahaman yang tepat pula.

Kata radikalisme berasal dari bahasa Latin *radix*, yang berarti akar. Dalam pengertian dasarnya, radikal berarti mengakar atau sampai ke akar-akarnya. Dalam konteks pemikiran, berpikir radikal sebenarnya bukanlah hal yang buruk—berpikir sampai ke akar persoalan adalah bagian dari tradisi intelektual yang sehat. Namun, ketika kata radikal dilekatkan dengan *isme*, maknanya bergeser. Radikalisme sebagai paham merujuk pada cara pandang atau ideologi yang menginginkan perubahan sosial dan politik secara mendasar, sering kali dengan cara-cara kekerasan.

Sementara itu, ekstremisme lebih merujuk pada sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Dalam

bahasa Arab, ekstremisme sering diistilahkan dengan al-tatarruf (berada di pinggiran), al-tasyaddud (bersikap keras), atau al-ghuluw (melampaui batas). Ketiga istilah ini menggambarkan sikap yang tidak proporsional dalam menjalankan ajaran agama—terlalu keras pada tempat yang seharusnya longgar, atau terlalu longgar pada tempat yang seharusnya tegas.

9.1.2 Ciri-Ciri yang Dapat Dikenali

Bagaimana kita mengenali seseorang atau kelompok yang berpaham radikal? Para ahli telah merumuskan beberapa ciri yang dapat menjadi penanda. Ciri-ciri ini tidak selalu muncul sekaligus, tetapi biasanya ada pola yang dapat dikenali.

Ciri pertama adalah klaim kebenaran tunggal. Kelompok radikal cenderung merasa bahwa hanya pendapat mereka yang benar, dan semua yang berbeda dianggap salah. Mereka mudah menyalahkan, bahkan mengkafirkan, orang lain yang berbeda pandangan. Sikap ini lahir dari cara berpikir yang sempit dan tertutup terhadap kemungkinan bahwa kebenaran bisa memiliki banyak wajah, sebagaimana manusia hanya memiliki kebenaran yang relatif.

Ciri kedua adalah pemahaman tekstual dan parsial terhadap teks agama. Kelompok radikal cenderung memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara literal, tanpa memperhatikan konteks turunnya (asbab al-nuzul), tanpa mempertimbangkan tujuan esensial syariat (maqasid al-syariah), dan tanpa merujuk pada penafsiran ulama yang mumpuni. Mereka mengambil potongan-potongan dalil untuk

membenarkan tindakan mereka, tanpa memahami keseluruhan pesan agama.

Ciri ketiga adalah sikap eksklusif dan intoleran. Kelompok radikal cenderung memisahkan diri dari masyarakat umum, merasa diri paling suci, dan menganggap kelompok lain sesat atau najis. Mereka menolak pluralitas dan mengabaikan aturan hukum yang berlaku. Sikap ini menciptakan sekat-sekat yang memisahkan "kami" dari "mereka," dan sekat-sekat itulah yang kemudian menjadi lahan subur bagi kekerasan.

Ciri keempat adalah pembenaran kekerasan. Kelompok radikal meyakini bahwa cara-cara kekerasan adalah sah untuk mencapai tujuan. Mereka memaknai jihad secara sempit sebagai qital (perang), padahal jihad dalam Islam memiliki makna yang jauh lebih luas—mencakup menuntut ilmu, membantu fakir miskin, berbakti kepada orang tua, dan menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim. Pemaknaan yang sempit dan keliru inilah yang melahirkan tindakan-tindakan destruktif atas nama agama.

9.1.3 Radikalisme sebagai Proses, Bukan Sekadar Label

Salah satu hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa radikalisme bukanlah label yang melekat pada seseorang sejak lahir, melainkan sebuah proses. Seseorang tidak tiba-tiba menjadi radikal dalam semalam. Ada tahapan-tahapan yang dilalui: dari pengenalan, penanaman, penghayatan, hingga penguatan. Pada tahap awal, seseorang mulai terpapar pada narasi-narasi yang memisahkan

"kami" yang benar dari "mereka" yang salah. Narasi ini bisa datang dari berbagai sumber: ceramah, bacaan, atau konten media sosial. Pada tahap berikutnya, narasi tersebut mulai dihayati dan menjadi bagian dari identitas. Jika tidak ada intervensi, tahap berikutnya adalah penguatan, di mana seseorang mulai bertindak berdasarkan paham yang dianutnya.

Memahami radikalisisasi sebagai proses berarti kita juga memahami bahwa pencegahan bisa dilakukan pada setiap tahap. Semakin dini intervensi dilakukan, semakin besar kemungkinan seseorang untuk kembali ke jalan yang seimbang.

9.2 Faktor Penyebab Radikalisisasi di Kalangan Generasi Muda

9.2.1 Mengapa Generasi Muda Rentan?

Generasi muda adalah kelompok yang paling rentan terhadap paparan paham radikal. Ada beberapa alasan mengapa demikian. Pertama, masa muda adalah masa pencarian identitas. Anak-anak dan remaja sedang dalam proses menemukan siapa diri mereka, apa nilai yang mereka pegang, dan bagaimana mereka ingin hidup. Dalam proses pencarian ini, mereka sangat terbuka terhadap berbagai pengaruh, termasuk pengaruh yang bersifat ekstrem.

Kedua, generasi muda memiliki semangat yang tinggi, tetapi sering kali belum diimbangi dengan kematangan berpikir dan kedalaman ilmu. Mereka ingin melakukan sesuatu yang bermakna, ingin menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Kelompok radikal memahami

psikologi ini, dan mereka menawarkan narasi yang menggabungkan semangat, pengorbanan, dan rasa kebersamaan dalam satu paket yang menggoda.

Ketiga, generasi muda hari ini hidup di era digital. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di media sosial, tempat di mana algoritma bekerja tanpa henti menyajikan konten sesuai preferensi mereka. Jika preferensi mereka mengarah pada konten-konten tertentu, algoritma akan terus menyajikan konten serupa, menciptakan apa yang disebut sebagai echo chamber—ruang gema di mana seseorang hanya mendengar pendapat yang sama dengan pendapatnya sendiri.

9.2.2 Faktor-Faktor yang Mendorong Radikalisasi

Para ahli telah mengidentifikasi berbagai faktor yang mendorong radikalisasi di kalangan generasi muda. Faktor-faktor ini saling terkait, dan biasanya tidak berdiri sendiri.

Faktor pertama adalah pemahaman keagamaan yang literal dan parsial. Radikalisme agama sering kali bersumber dari pemahaman yang memotong-motong ayat Al-Qur'an, tanpa memperhatikan konteks dan keseluruhan pesan agama. Seseorang yang memiliki pemahaman keagamaan yang dangkal lebih rentan terhadap narasi-narasi radikal, karena ia tidak memiliki bekal untuk menilai kebenaran narasi tersebut.

Faktor kedua adalah faktor sosial-politik. Kekecewaan terhadap kondisi sosial-politik yang dianggap tidak adil dapat mendorong seseorang untuk mencari solusi radikal. Ketika seseorang

merasa bahwa sistem yang ada tidak mampu memperbaiki keadaan, ia mungkin mulai mencari alternatif, termasuk alternatif yang bersifat ekstrem. Dalam konteks ini, radikalisme lebih tepat dilihat sebagai gejala sosial-politik daripada semata-mata gejala keagamaan.

Faktor ketiga adalah faktor psikologis. Perasaan terzalimi, tidak mendapat keadilan, kekecewaan terhadap pemimpin, atau dendam terhadap aparat dapat menjadi pemicu radikalisasi. Ketika seseorang merasa bahwa dirinya atau kelompoknya diperlakukan tidak adil, dan tidak ada saluran yang tersedia untuk menyuarakan kekecewaan itu, ia mungkin beralih pada cara-cara ekstrem.

Faktor keempat adalah faktor ekonomi. Kesenjangan sosial dan kemiskinan dapat menciptakan rasa frustrasi yang mendalam. Dalam kondisi seperti ini, narasi-narasi yang menawarkan solusi radikal bisa terdengar menarik, terutama jika dikemas dengan janji-janji keadilan dan kesejahteraan.

Faktor kelima adalah lingkungan pergaulan dan keluarga. Lingkungan keluarga, sekolah, dan pergaulan memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara pandang seseorang. Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang menanamkan nilai-nilai intoleransi dan kebencian, maka ia akan lebih rentan terhadap radikalisasi.

9.2.3 Peran Kerentanan Psikologis

Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja yang terpapar radikalisasi sering mengalami kerentanan psikologis. Mereka mungkin merasa

terisolasi, tidak dipahami, atau tidak memiliki tempat untuk mengekspresikan diri. Kelompok radikal memanfaatkan kerentanan ini dengan menawarkan rasa kebersamaan, penerimaan, dan tujuan hidup yang jelas.

Seorang psikolog menekankan pentingnya kedekatan emosional antara orang tua dan anak sebagai langkah preventif. Ketika anak merasa didengar dan didampingi, mereka akan lebih tangguh menghadapi berbagai pengaruh negatif dari lingkungan maupun dunia digital. Komunikasi yang terbuka dan penuh empati menjadi kunci untuk mendeteksi perubahan perilaku anak sejak dini.

9.3 Pola Penyebaran Paham Radikal melalui Media Digital

9.3.1 Pergeseran dari Fisik ke Digital

Ada satu perubahan besar yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir: penyebaran paham radikal telah bergeser dari dunia fisik ke dunia digital. Jika dahulu propaganda dan perekrutan dilakukan melalui pertemuan tatap muka, pengajian tertutup, atau selebaran, kini semuanya dilakukan melalui layar ponsel.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat bahwa sepanjang tahun 2025, terdapat 21.199 konten bermuatan intoleransi, radikalisme, dan terorisme (IRT) di ruang digital. Konten-konten tersebut didominasi oleh propaganda, pendanaan, dan perekrutan, dengan pola komunikasi yang disesuaikan dengan karakter anak dan remaja.

Yang lebih mengkhawatirkan, proses radikalasi melalui ruang digital berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan cara konvensional. Jika sebelumnya membutuhkan waktu 2 hingga 5 tahun, kini radikalasi melalui media sosial dapat terjadi hanya dalam kurun 3 hingga 6 bulan. Kecepatan ini dimungkinkan oleh algoritma yang terus-menerus menyajikan konten serupa, serta interaksi yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

9.3.2 Mekanisme Digital Grooming

Proses radikalasi digital sering menggunakan mekanisme yang disebut digital grooming. Tahapannya meliputi: paparan berulang terhadap konten ekstrem, normalisasi perilaku melalui algoritma, kemudian isolasi ke dalam grup tertutup. Di ruang inilah doktrin ditanamkan secara lebih intensif.

Pada tahap awal, seseorang mungkin hanya melihat konten-konten yang bersifat provokatif atau memancing emosi. Konten-konten ini dirancang untuk menarik perhatian, mungkin dengan narasi tentang ketidakadilan, penderitaan umat, atau kebencian terhadap kelompok tertentu. Algoritma kemudian menangkap ketertarikan ini dan menyajikan lebih banyak konten serupa.

Pada tahap berikutnya, orang tersebut mulai diarahkan ke grup-grup tertutup, sering kali melalui platform seperti Telegram atau WhatsApp. Di grup tertutup ini, narasi-narasi ekstrem disampaikan secara lebih intensif, tanpa gangguan dari pandangan-pandangan yang berbeda. Inilah yang disebut sebagai echo chamber—ruang di mana

seseorang hanya mendengar pendapat yang sama, dan semakin yakin bahwa pendapat itulah yang benar.

9.3.3 Strategi Komunikasi Berlapis

Kelompok ekstremis menggunakan strategi komunikasi berlapis untuk menyebarkan narasi mereka. Strategi pertama adalah mainstream infiltration, yaitu memasukkan pesan ideologis ke dalam isu-isu sosial yang sedang tren, seperti keadilan ekonomi atau ketimpangan politik. Dengan cara ini, narasi ekstrem terlihat relevan dan tidak mencurigakan.

Strategi kedua adalah community building, yakni membentuk grup daring tertutup untuk memperkuat rasa kebersamaan. Di grup ini, anggota merasa menjadi bagian dari komunitas yang eksklusif, yang memiliki tujuan bersama dan saling mendukung.

Strategi ketiga adalah mobilization, yaitu mengarahkan anggota grup untuk menyebarkan konten propaganda di platform publik menggunakan akun palsu atau bot network. Dengan cara ini, narasi ekstrem dapat menyebar lebih luas, menciptakan kesan bahwa pandangan tersebut adalah pandangan mayoritas.

9.3.4 Dampak Psikologis Paparan Konten Ekstrem

Paparan konten ekstrem yang berulang-ulang memiliki dampak psikologis yang serius. Individu yang terpapar narasi ekstrem secara terus-menerus akan mengalami apa yang disebut sebagai cognitive

closure—suatu kondisi di mana seseorang hanya mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinannya sendiri, dan menolak informasi yang bertentangan.

Akibatnya, terbentuklah polarisasi sosial yang tajam antara "kami" dan "mereka." Seseorang yang terpapar konten ekstrem akan semakin yakin bahwa kelompoknya adalah korban, dan kelompok lain adalah ancaman. Kondisi ini diperburuk oleh penggunaan bahasa emosional dan visualisasi kekerasan yang memicu empati selektif—simpati terhadap kelompok sendiri, dan kebencian terhadap pihak lain.

Penelitian menunjukkan bahwa pengguna muda (usia 15–24 tahun) paling rentan mengalami perubahan sikap ekstrem setelah terpapar konten yang menekankan narasi ketidakadilan dan pengorbanan. Algoritma yang terus-menerus menyajikan konten serupa menciptakan ilusi kebenaran (*illusory truth effect*), yang membuat pengguna yakin bahwa pandangan ekstrem tersebut adalah representasi opini mayoritas.

9.4 Peran Pendidikan dalam Deradikalisasi dan Pencegahan Ekstremisme

9.4.1 Sekolah sebagai Garda Terdepan

Sekolah memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam pencegahan ekstremisme. Ini bukanlah tugas tambahan, melainkan bagian integral dari misi pendidikan itu sendiri—membentuk manusia yang utuh, yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan spiritual.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama BNPT telah mengembangkan pendekatan pencegahan yang menekankan pentingnya sinergi empat pusat pendidikan: lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. Keempat lingkungan ini memiliki peran dalam mendampingi anak, terutama pada masa pertumbuhan ketika mereka sedang membangun identitas dan mencari ruang untuk berekspresi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menekankan bahwa pendekatan yang digunakan harus humanis, inklusif, dan partisipatif. "Kita mendampingi mereka karena suasana aman, perasaan terlindungi, dan rasa di mana mereka mendapatkan pengakuan itu menjadi modal dan bekal yang penting untuk kita mendidik anak-anak kita menjadi generasi Indonesia yang hebat," ujarnya.

9.4.2 Sekolah Ramah dan Inklusif

Salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah konsep Sekolah Ramah dan Inklusif. Terdapat empat pilar utama yang perlu dibangun sekolah untuk menekan potensi ekstremisme. Pilar pertama adalah ramah, yakni menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari perundungan. Pilar kedua adalah inklusif, yaitu menghargai perbedaan tanpa diskriminasi terhadap siswa mana pun. Pilar ketiga adalah responsif, dengan menyediakan sistem pelaporan yang aman dan cepat. Pilar keempat adalah kolaboratif, yakni membuka ruang dialog agar siswa dapat mengekspresikan diri secara positif.

Pendekatan ini penting karena sebagian anak yang terpapar paham kekerasan dan radikalisme memiliki keterbatasan ruang sosial dan ekspresi. Karena itu, anak perlu didampingi melalui pendekatan sosial yang humanis serta diberikan ruang aktualisasi yang edukatif, bermanfaat, dan produktif sesuai bakat dan minat mereka.

9.4.3 Integrasi Moderasi Beragama dalam Kurikulum

Pendidikan Agama Islam memiliki peran kunci dalam mencegah radikalisasi. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan kurikulum PAI berbasis moderasi beragama sangat efektif dalam mengurangi sikap radikal dan meningkatkan sikap inklusif di kalangan siswa. Nilai-nilai seperti *tawassuth* (jalan tengah), *tawazun* (keseimbangan), *i'tidal* (keadilan), dan *tasamuh* (toleransi) membantu siswa untuk memahami pentingnya kerukunan antar umat beragama.

Penelitian di Malang Raya menemukan bahwa 70% siswa mengalami peningkatan sikap toleransi terhadap agama lain setelah mengikuti pendidikan berbasis moderasi beragama. Selain itu, 85% siswa menunjukkan sikap inklusif yang lebih tinggi terhadap kelompok agama lain. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan yang menanamkan nilai-nilai moderasi sejak dini dapat menjadi benteng yang efektif terhadap paparan paham radikal.

Peran guru yang terlatih dalam mengimplementasikan moderasi beragama sangat krusial. Guru tidak hanya mengajarkan teori, tetapi

juga menjadi teladan dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Karena itu, penguatan pelatihan guru dan integrasi lebih lanjut nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum menjadi prioritas.

9.4.4 Deteksi Dini dan Pendekatan Humanis

Deteksi dini harus dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga tempat ibadah. Anak-anak perlu diarahkan pada pemahaman agama yang sejuk, toleran, dan tidak mudah menganggap pendapatnya paling benar. Generasi muda, terutama pengguna aktif media sosial, harus diberikan edukasi agar mampu mengenali tanda-tanda penyimpangan ajaran dan menghindari provokasi.

Pendekatan yang digunakan harus humanis, bukan sekuritisasi. Anak-anak yang terpapar radikalisme bukanlah musuh yang harus dihadapi dengan kekerasan, melainkan korban yang memerlukan pendampingan. BNPT bersama Tim Koordinasi Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Jaringan Terorisme terus memastikan upaya rehabilitasi, pendampingan psikososial, dan perlindungan hak anak berjalan optimal.

9.5 Kolaborasi Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat dalam Menangkal Radikalisme

9.5.1 Keluarga sebagai Benteng Utama

Keluarga adalah benteng utama dalam membentuk karakter anak. Pencegahan radikalisme harus dimulai dari rumah. Orang tua perlu membangun komunikasi yang hangat, menanamkan nilai agama, toleransi, dan kebangsaan sejak dini,

serta mengawasi aktivitas digital anak agar tumbuh menjadi generasi yang berkarakter dan cinta tanah air.

Komunikasi yang terbuka dan penuh empati menjadi kunci untuk mendeteksi perubahan perilaku anak sejak dini. Ketika anak merasa didengar dan didampingi, mereka akan lebih tangguh menghadapi berbagai pengaruh negatif dari lingkungan maupun dunia digital. Seorang psikolog menekankan bahwa kedekatan emosional antara orang tua dan anak adalah langkah preventif yang paling efektif.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah juga menekankan pentingnya hubungan antara orang tua dan anak sebagai bagian dari pencegahan. "Tidak hanya educate, tetapi juga nurture. Tidak hanya mendidik, tetapi juga membimbing. Inilah yang menjadi penting, bagaimana membangun relasi dan keharmonisan keluarga sebagai faktor untuk mendukung program ini," ujarnya.

9.5.2 Peran Masyarakat dan Komunitas

Masyarakat perlu bersatu, menjunjung Pancasila, dan meningkatkan literasi sebagai benteng menghadapi ancaman intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Komunitas lokal dapat menjadi agen perdamaian yang mengkampanyekan bahaya radikalisme dan terorisme di tengah masyarakat.

Kerja sama antar sekolah dengan masyarakat dan orang tua adalah pola koordinasi yang rutin dan sistematis. Kerjasama tidak hanya dilakukan dalam konteks memberikan solusi atas persoalan yang muncul, tetapi juga harus dilakukan dengan tujuan

antisipasi atau pencegahan. Ketika sekolah, keluarga, dan masyarakat bekerja sama, mereka menciptakan ekosistem yang kokoh untuk melindungi anak-anak dari pengaruh negatif.

9.5.3 Sinergi Tiga Pilar

Di tingkat kelurahan, Tiga Pilar (Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Lurah) berinisiatif menyatukan elemen pendidikan serta masyarakat untuk memperkuat nilai moderasi beragama. Guru ngaji TPQ, guru sekolah, dan orang tua harus menjadi garda depan menjaga anak-anak.

Dalam sebuah penyuluhan di Malang, Bhabinkamtibmas menegaskan bahwa moderasi beragama harus ditanamkan sejak dini agar anak-anak memiliki ketahanan moral terhadap konten berbahaya di media sosial maupun ajakan paham yang tidak moderat. "Deteksi dini harus dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga tempat ibadah. Anak-anak perlu diarahkan pada pemahaman agama yang sejuk, toleran, dan tidak mudah menganggap pendapatnya paling benar," jelasnya.

9.5.4 Kolaborasi Lintas Sektor

Pencegahan Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme (IRET) membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Penguatan karakter, komunikasi dalam keluarga, pendidikan yang inklusif, serta literasi digital menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan generasi muda terhadap pengaruh paham radikal.

Di Singkawang, Satgaswil Kalimantan Barat Densus 88 AT Polri berkolaborasi dengan Komunitas

Gerakan Singkawang Hebat menggelar kegiatan sosialisasi yang menghadirkan unsur pemerintah daerah, tokoh agama, psikolog, aparat keamanan, serta eks narapidana terorisme sebagai narasumber. Kegiatan ini bertujuan memperkuat upaya pencegahan melalui pendekatan edukatif dan humanis.

Yang menarik, seorang eks napiter yang hadir sebagai narasumber berpesan kepada para pelajar: "Jangan mudah percaya pada informasi dari satu sumber saja. Bangun pola pikir kritis, perbanyak literasi, dan jangan pernah ragu berdiskusi dengan guru, orang tua, atau pihak yang tepat ketika menemukan informasi yang meragukan. Jangan sampai mengulangi kesalahan yang pernah saya lakukan".

Melalui pendekatan kolaboratif dan humanis, termasuk pelibatan eks napiter sebagai narasumber, diharapkan semakin banyak generasi muda yang memiliki daya pikir kritis, menjunjung tinggi nilai toleransi, serta berkomitmen menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB X

STRATEGI MEMBANGUN GENERASI MUSLIM YANG MODERAT DAN BERKEADABAN

10.1 Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Moderasi

10.1.1 Mengapa Kurikulum Perlu Direkonstruksi?

Kurikulum adalah jantung dari pendidikan. Ia menentukan apa yang diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, dan nilai-nilai apa yang ditanamkan kepada peserta didik. Jika kita ingin membangun generasi yang moderat, maka kurikulum pendidikan Islam harus mencerminkan nilai-nilai moderasi itu sendiri—bukan hanya sebagai tambahan, melainkan sebagai ruh yang menjiwai seluruh proses pembelajaran.

Penelitian menunjukkan bahwa kurikulum Pendidikan Agama Islam perlu direkonstruksi agar lebih inklusif, kontekstual, dan berpijak pada tradisi keilmuan Islam yang beragam. Prinsip-prinsip moderasi beragama—keadilan, keseimbangan, toleransi, dan anti-ekstremisme—memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam, dan karena itu menjadi fondasi esensial bagi pembelajaran PAI. Tanpa rekonstruksi, kurikulum PAI berisiko tetap terjebak pada pendekatan yang tekstual dan

normatif, yang justru dapat memperkuat cara berpikir yang sempit.

10.1.2 Arah Rekonstruksi Kurikulum

Arah rekonstruksi kurikulum PAI berbasis moderasi dapat dirumuskan melalui beberapa langkah. Pertama, kurikulum perlu dirancang untuk mengembangkan pemahaman keagamaan yang komprehensif. Ini berarti materi pembelajaran tidak hanya menyajikan satu perspektif tunggal, melainkan memperkenalkan peserta didik pada keragaman penafsiran dalam tradisi keilmuan Islam. Peserta didik perlu belajar bahwa dalam Islam, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan telah ada sejak masa para sahabat.

Kedua, kurikulum perlu bersifat kontekstual. Materi pembelajaran tidak boleh hanya berkuat pada teks-teks normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas sosial yang dihadapi peserta didik. Misalnya, ketika membahas tentang toleransi, peserta didik diajak untuk melihat bagaimana nilai tersebut dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan mereka. Pendekatan kontekstual, reflektif, dan berbasis karakter yang menekankan pada afeksi, kognisi, dan psikomotorik peserta didik dinilai efektif dalam menginternalisasikan nilai-nilai moderasi.

Ketiga, kurikulum perlu mengintegrasikan nilai moderasi ke dalam seluruh mata pelajaran PAI, bukan hanya dalam satu topik khusus. Nilai-nilai seperti tawassuth (jalan tengah), i'tidal (keadilan), tasamuh (toleransi), dan musyawarah dapat diinternalisasikan secara sistematis dalam materi

ajar, metode pembelajaran, serta orientasi pendidikan Islam secara umum. Dalam mata pelajaran Al-Qur'an Hadis, misalnya, peserta didik diajak untuk memahami ayat-ayat tentang keragaman dan kebebasan beragama. Dalam mata pelajaran Akidah Akhlak, mereka belajar tentang pentingnya keadilan dan sikap seimbang. Dalam Fiqih, mereka memahami bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan memperhatikan konteks.

10.1.3 Fleksibilitas Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka memberikan peluang yang besar bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Fleksibilitas ini dapat dimanfaatkan untuk menanamkan nilai-nilai moderasi secara lebih kontekstual dan partisipatif. Satuan pendidikan dapat merancang proyek-proyek pembelajaran yang secara langsung melibatkan peserta didik dalam kegiatan lintas kelompok, dialog antaragama, atau aksi sosial yang memperkuat nilai-nilai kebersamaan.

Penelitian menegaskan bahwa Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai keislaman yang moderat secara sistemik dan partisipatif. Implikasinya adalah pentingnya reformulasi kurikulum PAI yang lebih responsif terhadap tantangan radikalisme dan intoleransi melalui pendekatan pendidikan yang humanistik dan transformatif.

10.2 Penguatan Kompetensi Guru dalam Menanamkan Nilai Moderasi

10.2.1 Guru sebagai Agen Moderasi

Guru Pendidikan Agama Islam memiliki posisi yang sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai moderasi. Mereka bukan hanya penyampai materi pelajaran, tetapi juga teladan, fasilitator, dan agen perubahan yang membentuk iklim keagamaan di sekolah. Dalam konteks ini, kompetensi guru tidak cukup hanya diukur dari penguasaan materi keagamaan, tetapi juga dari kemampuan mereka untuk menginternalisasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai moderasi dalam tindakan nyata.

Seorang Kepala Kantor Kementerian Agama menegaskan bahwa guru PAI hari ini tidak cukup hanya menguasai materi keagamaan secara tekstual. Mereka harus mampu menjadi agen moderasi, yang bisa menanamkan nilai-nilai kasih sayang, toleransi, dan kedamaian di tengah peserta didik. Guru PAI juga harus adaptif dan kreatif dalam mengintegrasikan teknologi demi kemajuan pembelajaran.

10.2.2 Dimensi Kompetensi yang Perlu Diperkuat

Penguatan kompetensi guru dalam menanamkan nilai moderasi mencakup beberapa dimensi. Dimensi pertama adalah pemahaman konseptual. Guru perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep moderasi beragama, termasuk landasan teologisnya dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta bagaimana konsep ini diterapkan dalam

konteks pendidikan. Pemahaman ini menjadi fondasi bagi kemampuan guru untuk mengajarkan moderasi secara meyakinkan dan tidak sekadar normatif.

Dimensi kedua adalah kemampuan pedagogik. Guru perlu menguasai pendekatan pembelajaran yang dialogis, reflektif, kolaboratif, dan eksperiensial—pendekatan-pendekatan yang efektif dalam menumbuhkan kesadaran beragama yang moderat di kalangan peserta didik. Guru juga perlu mampu merancang pembelajaran yang mengintegrasikan isu-isu sosial dan keberagaman ke dalam diskusi kelas.

Dimensi ketiga adalah kemampuan menjadi teladan. Moderasi tidak bisa diajarkan hanya melalui kata-kata. Peserta didik belajar dari apa yang mereka lihat dan alami. Guru yang moderat adalah guru yang menunjukkan sikap adil, toleran, dan seimbang dalam interaksi sehari-hari—baik dengan peserta didik, rekan kerja, maupun masyarakat luas.

Dimensi keempat adalah kemampuan mengelola keberagaman. Guru perlu memiliki keterampilan untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman dan inklusif bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang agama, suku, atau budaya yang berbeda. Dalam konteks ini, guru juga perlu mampu menjadi mediator ketika terjadi konflik atau ketegangan antar peserta didik.

10.2.3 Strategi Penguatan Kompetensi

Penguatan kompetensi guru dapat dilakukan melalui berbagai strategi. Pelatihan dan workshop yang secara khusus membahas integrasi moderasi

beragama dalam pembelajaran PAI menjadi langkah awal yang penting. Pelatihan semacam ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoretis, tetapi juga memberikan kesempatan bagi guru untuk berlatih merancang pembelajaran yang berbasis moderasi.

Selain itu, pengembangan komunitas belajar di antara guru PAI juga sangat bermanfaat. Melalui komunitas ini, guru dapat saling berbagi pengalaman, tantangan, dan praktik baik dalam menanamkan nilai-nilai moderasi. Kolaborasi semacam ini dapat memperkuat kapasitas guru secara kolektif, serta menciptakan dukungan sosial yang penting bagi keberlanjutan upaya penguatan moderasi.

Penting juga untuk mengembangkan modul pembelajaran yang berorientasi pada nilai-nilai moderasi. Guru PAI dapat menyusun modul yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai moderasi ke dalam materi pembelajaran, sehingga memudahkan implementasi di kelas. Modul semacam ini juga dapat menjadi sumber belajar bagi guru lain yang ingin mengembangkan pembelajaran serupa.

10.3 Kolaborasi Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal

10.3.1 Tripusat Pendidikan dan Sinergi yang Diperlukan

Pendidikan bukanlah tanggung jawab sekolah semata. Sejak lama, para ahli pendidikan telah mengenal konsep tripusat pendidikan—tiga pusat pendidikan yang saling melengkapi: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam konteks pendidikan

Islam, ketiga pusat ini memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai moderasi.

Penelitian menunjukkan bahwa kurikulum hidup (living curriculum) PAI menekankan integrasi pembelajaran formal dengan pengalaman kehidupan sehari-hari untuk memfasilitasi internalisasi nilai-nilai Islam secara holistik. Keluarga meletakkan fondasi awal penanaman nilai-nilai keagamaan melalui keteladanan, sekolah memperkuat nilai-nilai tersebut melalui pembelajaran yang sistematis dan pembiasaan spiritual, sementara masyarakat menjadi ruang aktualisasi nilai-nilai dalam praktik sosial nyata.

10.3.2 Peran Masing-Masing Pusat Pendidikan

Keluarga adalah pendidikan pertama dan utama bagi anak. Di sinilah nilai-nilai dasar ditanamkan, termasuk nilai toleransi, keadilan, dan kasih sayang. Orang tua perlu menyadari bahwa pendidikan agama tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Mereka harus terlibat aktif dalam menanamkan nilai-nilai moderasi di rumah, melalui keteladanan, pembiasaan, dan komunikasi yang terbuka.

Sekolah berperan sebagai penguat nilai-nilai yang telah ditanamkan di keluarga. Melalui kurikulum, budaya sekolah, dan keteladanan guru, sekolah mengembangkan pemahaman yang lebih sistematis tentang moderasi beragama. Sekolah juga menyediakan ruang bagi peserta didik untuk berinteraksi dengan teman-teman dari latar belakang yang beragam, sehingga mereka dapat mempraktikkan nilai-nilai toleransi secara langsung.

Masyarakat adalah ruang aktualisasi nilai-nilai. Di sinilah peserta didik melihat bagaimana nilai-nilai moderasi dipraktikkan dalam kehidupan nyata—dalam interaksi dengan tetangga yang berbeda agama, dalam kegiatan sosial bersama, atau dalam menyelesaikan konflik secara damai. Masyarakat yang moderat akan menjadi laboratorium yang efektif bagi pembentukan karakter moderat peserta didik.

10.3.3 Bentuk Kolaborasi yang Diperlukan

Kolaborasi antara ketiga pusat pendidikan ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Pertemuan rutin antara sekolah dan orang tua dapat menjadi forum untuk membahas perkembangan karakter peserta didik, serta menyepakati nilai-nilai yang ingin ditanamkan bersama. Kegiatan sosial yang melibatkan peserta didik, orang tua, dan masyarakat dapat menjadi sarana untuk mempraktikkan nilai-nilai moderasi secara nyata. Selain itu, sekolah dapat menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat untuk memperkuat program-program moderasi.

Pendidikan nonformal, seperti pesantren, majelis taklim, dan lembaga kursus keagamaan, juga memiliki peran penting. Lembaga-lembaga ini dapat menjadi pelengkap dan penguat pendidikan formal, terutama dalam hal pendalaman ilmu agama dan pembentukan karakter. Regulasi pendidikan nasional telah memberikan ruang bagi pendidikan nonformal untuk berfungsi sebagai substitusi,

penambahan, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat.

10.4 Model Sekolah/Madrasah Ramah Moderasi Beragama

10.4.1 Karakteristik Sekolah Ramah Moderasi

Sekolah atau madrasah yang ramah moderasi beragama adalah lembaga pendidikan yang secara sadar merancang ekosistemnya untuk menumbuhkan nilai-nilai moderasi. Ia bukan sekadar sekolah yang mengajarkan teori tentang toleransi, tetapi sekolah yang mempraktikkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari.

Karakteristik sekolah ramah moderasi dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari aspek kebijakan, sekolah memiliki komitmen yang jelas untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi, yang tercermin dalam visi-misi, tata tertib, dan program-program sekolah. Dari aspek kurikulum, nilai-nilai moderasi diintegrasikan dalam pembelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Dari aspek lingkungan, sekolah menciptakan suasana yang aman, inklusif, dan bebas dari diskriminasi. Dari aspek keteladanan, guru dan tenaga kependidikan menunjukkan sikap moderat dalam interaksi sehari-hari.

10.4.2 Praktik Baik dari Lapangan

Beberapa sekolah dan madrasah telah mengembangkan model yang inspiratif dalam membangun budaya moderasi. Sebuah madrasah di Surabaya, misalnya, telah mengembangkan program

moderasi beragama yang holistik dan sistematis melalui tiga pilar utama: pemberdayaan siswa sebagai agen perubahan melalui program “Duta Muda Moderasi Beragama”; penguatan ekosistem kelembagaan melalui pelatihan guru yang intensif; serta integrasi nilai moderasi ke dalam kurikulum, budaya sekolah, dan kemitraan strategis.

Hasilnya, madrasah tersebut tidak hanya berhasil membentuk karakter siswa yang toleran, prososial, dan cinta tanah air, tetapi juga mentransformasi iklim sekolah menjadi lebih aman, harmonis, dan kolaboratif. Model ini membuktikan bahwa implementasi moderasi beragama yang komprehensif dapat menjadi mekanisme instrumental untuk mewujudkan model pendidikan inklusif berbasis kerangka Sekolah Ramah Anak.

Praktik baik lainnya datang dari sebuah madrasah di Malang yang mengembangkan program moderasi beragama melalui berbagai kegiatan yang terstruktur. Program ini mencakup 45 kegiatan yang diimplementasikan melalui tiga pendekatan: ekstrakurikuler, integrasi dalam program sekolah, serta kegiatan belajar mengajar. Strategi yang digunakan adalah “3M” (murah, meriah, dan menginspirasi) serta “3A” (akali, adaptasi, dan aksi), sehingga mampu menjangkau seluruh warga madrasah dengan cara yang efektif dan inovatif.

10.4.3 Prinsip-Prinsip Pengembangan Model

Dari berbagai praktik baik yang ada, dapat dirumuskan beberapa prinsip dalam mengembangkan model sekolah ramah moderasi. Pertama, holistik—moderasi tidak boleh menjadi

program tambahan, melainkan harus diintegrasikan ke dalam seluruh aspek kehidupan sekolah. Kedua, partisipatif—semua warga sekolah, termasuk peserta didik, harus dilibatkan dalam merancang dan melaksanakan program moderasi. Ketiga, berkelanjutan—program moderasi harus dirancang untuk berjalan dalam jangka panjang, dengan regenerasi yang terencana. Keempat, kontekstual—program moderasi harus disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. Kelima, kolaboratif—sekolah perlu menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk orang tua, masyarakat, dan lembaga pemerintah.

10.5 Proyeksi dan Rekomendasi Kebijakan untuk Generasi Moderat Masa Depan

10.5.1 Proyeksi Masa Depan

Melihat perkembangan yang ada, moderasi beragama di Indonesia memiliki prospek yang menjanjikan, tetapi juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa moderasi beragama akan semakin terinstitusionalisasi dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan-kebijakan yang mendukung penguatan moderasi, seperti Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, memberikan landasan yang kuat bagi integrasi moderasi beragama dalam pendidikan.

Studi terhadap kebijakan tersebut mengidentifikasi empat model penguatan moderasi beragama dalam lembaga pendidikan: pemahaman, pencegahan, pemberantasan, dan pengembangan.

Strategi praktisnya meliputi pelatihan bagi guru PAI, pengembangan bahan ajar, kegiatan lintas agama, dan publikasi akademik. Model-model ini memberikan kerangka yang jelas bagi pengambil kebijakan dalam mengembangkan program moderasi yang lebih terstruktur dan terukur.

Ke depan, teknologi digital akan semakin berperan dalam pendidikan moderasi. Pengembangan media online sebagai ruang maya bersama untuk pertukaran ide dan gagasan moderasi beragama, penyelenggaraan dialog lintas budaya dan lintas agama, serta kampanye publik di berbagai platform media akan menjadi bagian penting dari strategi penguatan moderasi.

10.5.2 Rekomendasi untuk Pemangku Kepentingan

Berdasarkan analisis di atas, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan untuk memperkuat pendidikan moderasi beragama di Indonesia.

Untuk Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan: perlu terus mengembangkan dan menyempurnakan kurikulum PAI yang berbasis moderasi, dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi satuan pendidikan untuk mengadaptasi kurikulum sesuai konteks lokal. Pengembangan bahan ajar dan modul pembelajaran yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai moderasi juga perlu ditingkatkan.

Untuk lembaga pendidikan (sekolah/madrasah): perlu merancang program moderasi yang holistik, partisipatif, dan berkelanjutan. Program ini tidak

boleh hanya menjadi proyek sesaat, tetapi harus menjadi bagian dari budaya sekolah. Pengembangan Duta Moderasi Beragama di kalangan peserta didik dapat menjadi strategi yang efektif untuk melibatkan siswa secara aktif.

Untuk guru PAI: perlu terus mengembangkan kompetensi dalam menanamkan nilai-nilai moderasi. Guru harus menjadi teladan dalam bersikap moderat, serta mampu menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan aman bagi semua peserta didik. Guru juga perlu memanfaatkan teknologi digital secara positif untuk memperkuat pembelajaran moderasi.

Untuk keluarga dan masyarakat: perlu terlibat aktif dalam mendukung pendidikan moderasi di sekolah. Orang tua harus menanamkan nilai-nilai moderasi di rumah, sementara masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya sikap toleran dan inklusif.

10.5.3 Penutup

Membangun generasi muslim yang moderat dan berkeadaban bukanlah pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam semalam. Ia menuntut kesabaran, konsistensi, dan kolaborasi dari semua pihak. Namun, jika kita berhasil, hasilnya akan sangat berharga: generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual dan spiritual, tetapi juga mampu menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya ini. Melalui rekonstruksi kurikulum, penguatan kompetensi guru, kolaborasi

lintas pusat pendidikan, dan pengembangan model sekolah yang ramah moderasi, pendidikan Islam dapat menjadi garda terdepan dalam membangun generasi yang toleran, inklusif, dan berkeadaban. Inilah ikhtiar kita bersama, untuk Indonesia yang lebih damai dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abustani Ilyas. (2026). Belajar agama cuma dari Reels dan TikTok? Ilmunya bisa dangkal, vonisnya cepat. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.
<https://mui.or.id>
- Ahmad Sirojuddin, & Hairunnisa Hairunnisa. (2025). Integrasi nilai moderasi beragama dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam. TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, 9(1).
- Al-Attas, S. M. N. (1980). The concept of education in Islam: A framework for an Islamic philosophy of education. ISTAC.
- Al layyinah, J., & Nugroho, M. A. (2026). Moderate da'wah in the digital age: Challenges and ethics in social media: An Islamic perspective and local wisdom. Tafaqquh: Jurnal Ilmu Agama dan Pendidikan, 1(1).
- Al-Mawardi. (n.d.). Al-Nukat wa al-'Uyun: Tafsir al-Mawardi. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Azra, A. (2020). Radikalisme agama di kalangan umat Islam. Dalam Buku radikalisme revisi 2020. UIN Banten.
- Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. (2025). Laporan tahunan program moderasi beragama. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2024). Laporan survei indeks potensi radikalisme tahun 2024. Subdit Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Pencegahan.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2025). BNPT ajak komunitas Lampung jadi garda depan cegah radikalisme.
<https://www.bnpt.go.id>
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2025). BNPT tekankan pentingnya menjaga ruang digital bagi anak.
<https://www.bnpt.go.id>

- Banks, J. A. (2002). An introduction to multicultural education. Allyn and Bacon.
- Faturrahman Kamal. (2020). Menanggulangi ekstremisme dengan wasathiyah. Muhammadiyah.or.id. <https://muhammadiyah.or.id>
- Forum Kerukunan Umat Beragama DKI Jakarta. (2023). FKUB DKI gelar dialog lintas agama dan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan tingkat pelajar se-Jakarta. <https://fkub.org>
- Ibadurrahman, & Halik, A. (2026). Strategi guru PAI dalam mengintegrasikan literasi digital dan moderasi beragama di SMA Negeri 1 Palu. Rumah Jurnal UIN Datokarama Palu.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Moderasi beragama. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). Bicara pendidikan lintas iman, Menag: Mengetahui perbedaan dan memahami kemanusiaan. <https://m.kemenag.go.id>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). Kepala Kemenag: Menanam nilai cinta dan moderasi dalam era digital melalui Workshop Tahsinul Khat dan Deep Learning. Kemenag Lamongan.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). Menag perkenalkan Kurikulum Berbasis Cinta di Forum Lintas Iman Asia. <https://m.kemenag.go.id>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). Moderasi beragama untuk kerukunan dan kemaslahatan bangsa. <https://kemenag.go.id>
- Kementerian Dalam Negeri. (2026). Kemendagri gandeng sekolah tangkal ekstremisme berbasis kekerasan. <https://www.radicalismstudies.org>

- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026). Kolaborasi Kemendikdasmen dan BNPT cegah ekstremisme berbasis kekerasan di satuan pendidikan (Siaran Pers No. 778/sipers/A6/IX/2026).
- Kosim, M., Kustati, M., Sirait, W. R., Fajri, S., Febriani, S. R., Mufti, & Perrodin, D. D. (2024). Developing a religious moderation-based curriculum model for laboratory madrasah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2).
- Lembaga Ketahanan Nasional. (n.d.). *Kriteria Islam radikal*. Perpustakaan Lemhannas RI.
- Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Masduki Baidlowi. (2025). Fenomena "algorithmic religion", tantangan baru MUI di era digital jadi fokus Munas XI. Majelis Ulama Indonesia. <https://mui.or.id>
- Muhadjir, A. (2019). *Moderasi beragama: Perspektif fikih [Makalah]*. Seminar Nasional Moderasi Beragama, Jakarta.
- Mulia, M. (2020). *Ensiklopedi Muslimah reformis*. Dian Rakyat.
- Nirmala Hidayati, & Syaifuddin, M. (2026). Synergy tripusat of education in the living curriculum Islamic religious education. *Proceeding UIN Gus Dur*.
- Polri. (2026). Dari pengalaman menuju pencegahan, eks napiter ajak pelajar Singkawang tolak paham radikal. Divisi Humas Polri. <https://humas.polri.go.id>
- Radicalism Studies. (2025). BNPT: 112 anak terpapar radikalisme lewat media sosial dan gim online. <https://www.radicalismstudies.org>
- RRI.co.id. (2026). FKUB Makassar perkuat moderasi beragama hingga pendidikan dasar. <https://rri.co.id>
- Safitri, C. N. (2025). Pelaksanaan peningkatan literasi digital dan moderasi beragama siswa melalui penerapan e-learning

- pada pembelajaran PAI di MAN 2 Merangin Jambi [Skripsi]. Universitas Islam Indonesia.
- Shihab, M. Q. (2019). Wasathiyah: Wawasan Islam tentang moderasi beragama. Lentera Hati.
- Subchi, I. (2026, Februari). Wakil Rektor UIN Jakarta unkit tantangan baru hijrah di era digital. Republika Online. <https://khazanah.republika.co.id>
- Susetyo, & Fakhrudin. (2026). Integrating religious moderation and digital literacy in Islamic religious education: A strategic pathway. *Journal of Islamic Education*, 2(1).
- Syamsi, S. (2020). Ummatan wasathan dalam perspektif tafsir. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 16(2).
- Tiga Pilar Ketawanggede. (2025). Tiga Pilar Ketawanggede perkuat moderasi beragama sejak dini, Polsek Lowokwaru tekankan deteksi dini di sekolah. <https://kelketawanggede.malangkota.go.id>
- Tilaar, H. A. R. (2004). Multikulturalisme: Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional. Grasindo.
- Tribrata News. (2025). Densus 88 AT Polri libatkan 110 pendidik dalam program "Sekolah Rukun dan Ramah Anak". <https://tribratanews.riau.polri.go.id>
- Tribrata News. (2026). Anak-anak Pontianak terancam radikalisme! Densus 88 AT Polri turun tangan. <https://tribratanews.polri.go.id>
- Triyanto, Sutarti, T., Sari, D. I., & Hidayatulloh, M. M. (2025). Interfaith dialogue in schools: A framework for promoting religious tolerance among students. *International Society for Technology, Education, and Science*.
- UIN KHAS Jember. (2025). Perkuat pilar moderasi: UIN KHAS Jember beri penguatan kompetensi guru PAI Purwakarta. FTIK UIN KHAS Jember.

- Ulumuna. (2025). Navigating diversity: FKUB's contribution to religious harmony in the digital age. *Ulumuna*, 29(2).
- UNESCO. (2020). *Inclusive education: A framework for action*. UNESCO Publishing.
- Yusuf Hanafi. (2026). Cegah radikalisme digital, UM gelar pelatihan konten moderasi beragama di Malang. Universitas Negeri Malang. <https://kliping.um.ac.id>
- Zuhdi, M. (2021). Pendidikan Islam dan moderasi beragama: Integrasi nilai dalam kurikulum. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1).